

BAB III

FILANTROPI SEBAGAI PRAKTIK POLITIK KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI SOSIAL

1.1 FILANTROPI SEBAGAI GERAKAN POLITIK

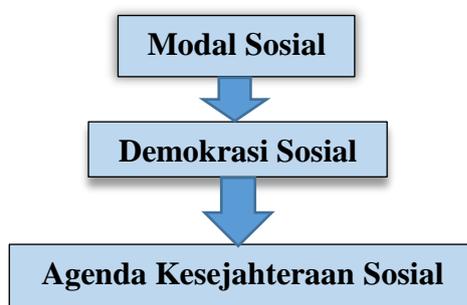
Filantropi sebagai gerakan politik artinya adanya kekuatan yang bersumber dari aktivitas praktik kerja sosial akan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Adapun filantropi sebagai gerakan politik didukung oleh beberapa hal yaitu cabang gerakan filantropi sebagai praktik politik kesejahteraan, pengaruh *background* Islam terhadap konsolidasi politik filantropi, filantropi sebagai gerakan oposisi (Perlawanan), gerakan politik filantropi dan filantropi sebagai gerakan politik profetik akan dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

1.1.1 Cabang Gerakan Filantropi sebagai Praktik Politik Kesejahteraan

Latar historis sebagai lembaga yang dilahirkan atas inisiatif aktivis muslim yang selanjutnya menjadi pimpinan elit politik PKS, menyebabkan praktik kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh PKPU masih berada pada garis sejajar dengan arah ideologi parpol. Politik kesejahteraan yang dilakukan oleh PKS tidak mudah dikenali atau *soft politics* (politik halus) dari dimensi kekuasaan (politik elektoral). Namun, justru gerakan-gerakan filantropi dalam mewujudkan kesejahteraan yang dijalankan PKPU lebih menonjolkan politik dengan karakter kepedulian, *humanitarian*, *charity*, dan kedermawanan. Dalam hal ini dibuktikan oleh masifnya intensitas kerja PKPU berbasis *advocacy* (pemberdayaan) maupun *charity* (santunan) yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya peningkatan komitmen kerja, sejalan dengan ungkapan Munthori (2018) selaku kepala cabang PKPU DIY:

“Tahun 2008 secara resmi sebagai mitra PBB di bawah ekosop sebagai NGO Social Consultative Council. Itu legalitasnya dan sejarahnya, kemudian untuk program-program kami kemudian secara kurun waktu memang berubah artinya PKPU melakukan inovasi perbaikan-perbaikan sehingga kalau memang program kami awalnya hanya sifatnya hanya charity (membuat langsung habis), sekarang ini kami lebih pada program yang sifatnya pemberdayaan. Kemudian di 2010 kami juga mendaftarkan ke kemensos RI itu menjadi sebuah Orsosnas dalam rangka berperan di dalam pengurangan PMKS terminologi dinsos penerima manfaatnya disebut PMKS (penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) disitu ada difabel, lansia, korban bencana orang yatim, dsb sekitarnya 20 jenis. Alhmdulillah tahun 2010 kami juga menjadi Orsosnas”.

Pada prinsipnya aktivitas filantropi sebagai praktik politik kesejahteraan memiliki cabang-cabang terkait yang saling mendukung arah gerakannya seperti bagan berikut:



Sumber: Diolah oleh Penulis (2018)

Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa modal sosial adalah kemampuan yang dilakukan untuk mengurangi permasalahan sosial dengan beberapa metode seperti kedermawanan (*philantropy*), *giving*, *networking*, dan *voluntary*. Kekuatan modal sosial tersebut yang akan mendukung terwujudnya demokrasi sosial ditandai dengan adanya solidaritas sosial berbasis kerja-kerja sosial PKPU dalam distribusi kesejahteraan. Adapun subyek demokrasi sosial dilakukan masyarakat dan negara. Artinya disini lembaga filantropi berbasis masyarakat

sipil dan negara sebagai penyedia pelayanan kesejahteraan. Sementara dengan berhasilnya demokrasi sosial baik yang dilakukan oleh masyarakat sipil maupun negara akan mendukung agenda kesejahteraan sosial. Ketika kesejahteraan sosial berhasil dilakukan oleh masyarakat sipil (*civil society*) yang mengisi kekosongan negara maka disitulah berhasilnya politik *citizenship* atau politik *intermediary*.

Untuk menjelaskan variasi cabang gerakan politik filantropi, penulis telah membagi dua jenis filantropi diantaranya politik filantropi inklusi dan politik filantropi yang berkarakter ideologis.

1. Politik filantropi inklusi merupakan konsep lembaga filantropi yang dilakukan dengan sebuah metode pendekatan dan pengembangan secara terbuka. Dalam hal ini narasi yang ada dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan lembaga filantropi PKPU sebagai lembaga yang inklusi, namun peneliti belum mendapat bukti empirik bahwa PKPU membantu di luar ideologi Islam. Seperti pemaparan Munthori (2018):

“Kalau donatur kami tidak membatasi, karena memang hobi mereka. Karena kami kemaren juga sudah menerima donasi dari kelompok pemain biola. Kemudian komunitas dapodik operator data. Dan kami memang tidak membatasi untuk beragama Islam atau tidak. Monggo, saja kalau berdonasi, kami hanya memfasilitasi saja”.

Tidak ada bukti representatif yang menunjukkan PKPU sebagai lembaga yang inklusi, maka dapat memungkinkan bahwa lembaga PKPU masih berjalan sesuai dengan karakter ideologi lembaga. Prinsip inklusi bukan hanya merujuk pada penyintas (korban) saja, melainkan semua hal termasuk dalam kemitraan, donatur maupun penerima manfaatnya harus berani membuka ruang

untuk non ideologi. Inklusi selalu bisa diakses semua kalangan dalam membantu proses pembangunan kesejahteraan, akan tetapi ketika lembaga sudah dalam ranah *secret society* menandakan bahwa lembaga tersebut bekerja atas dasar ideologi atau politik sektariat. Konsep lembaga filantropi dalam hal ini masih sebatas wacana dan belum bisa menjadi aturan yang baku untuk dilaksanakan.

2. Politik filantropi ideologis merupakan metode praktik kerja kemanusiaan berdasarkan persamaan ideologi. Seperti PKPU sebagai lembaga yang dilahirkan aktivis muslim dan sebelumnya pernah menjadi LAZ maka rasional ketika PKPU masih menerapkan ideologi Islam atau belum dapat menjadi lembaga filantropi terbuka (inklusi). Terbukti dengan beberapa sistem kemitraan berbasis lembaga atau komunitas Islam yang dijalankan dan juga ditegaskan oleh ungkapan Abdul Rais Kaharuddin:

“Kalau saat ini memang PKPU lebih fokus di dunia-dunia Islam. Salah satu selain memang PKPU bekas lembaga amil zakat. Jadi macam sisi keIslaman PKPU masih tertanam. Walaupun lembaga sosial itu tidak harus memegang itu. Tidak harus memegang aturan usia, Islam dll. Buktinya banyak salah satunya PKPU mengambil jatah dari hasil penghimpunan segala macam itu Cuma 12,5% itu sesuai hak amil. Lembaga lain ada sampai 30%-40%. Jadi potongan itu yang masih melekat di PKPU 12,5% maksimal atau di bawah itu. Jadi jauh sekali perbedaanya. Bayangkan 30% sudah banyak yang bisa dibantu. Potongan itu yang masih melekat di PKPU. Jadi wajar kalau PKPU fokus di dunia Islam yang sedang bermasalah khususnya”

Maka, ketika PKPU berjalan atas dasar ideologi disinilah terjadi politik ideologi Islam dengan misi dakwah. Ideologi tersebut untuk membangun kekuatan konsolidasi politik Islam, sehingga apabila semakin banyak

masyarakat Islam yang bergabung dalam aktivitas ini, secara perlahan kelompok tersebut akan menyusun strategi politik dalam menekan kebijakan negara melalui seruan aksinya. Banyak masyarakat yang tidak menyadari aktivitas ini, namun ketika diamati secara mendalam arah gerakan yang dilakukan PKPU cenderung ideologis. Gerakan dakwah ini tidak menutup kemungkinan berupaya untuk melakukan Islamisasi masyarakat sekaligus Islamisasi negara karena, hubungan ideologis parpol masih melekat kuat dalam lembaga PKPU, dimana pasca reformasi seiring dengan melemahnya kapasitas negara aktivitas filantropi sebagai upaya mewujudkan agenda kesejahteraan PKS sebagai agensi parpol berada dalam gerakan tersebut.

1.1.2 Pengaruh *Background* Islam terhadap Konsolidasi Politik Filantropi

Identitas Islam memang memiliki pengaruh besar dalam branding lembaga filantropi jangka panjang. Hal lain karena munculnya PKPU juga mengadopsi filantropi Islam tradisional yang spesifik pada aspek zakat, infaq, wakaf dan shodaqah. Filantropi Islam bisa menjadi alat politik yang berubah menjadi zakat politik dalam distribusi sembako menjelang pemilu atau pada masa kampanye dengan alasan shadaqah para calon kandidat parpol yang diberikan kepada masyarakat miskin. Namun, sejalan dinamika filantropi tradisional yang hanya jangka pendek membuat adanya transformasi filantropi keadilan melahirkan program jangka panjang melalui aktivitas pemberdayaan masyarakat menuju perubahan sosial yang lebih luas. Selanjutnya mengajak beberapa lembaga khususnya perusahaan yang selalu melibatkan beberapa elemen masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab membantu permasalahan sosial sebagai wujud kepedulian dan komitmen perusahaan.

Dasar keislaman menjadi peluang besar dimanfaatkan dalam ranah politik praktis sebagai sarana konsolidasi aliansi politik Islam. Melalui mesin sosial partai PKS yang lahir dari amal nyata kader sebagai bentuk untuk merespon fenomena sosial, dalam hal ini PKPU dan Rumah Zakat memegang kendali penuh untuk turut serta membantu misi PKS dalam pendekatan kultural kepada masyarakat melalui aktivitas pemberdayaan sosial dan distribusi kesejahteraan yang tidak lain untuk membantu misi elektoral partai.

Konsep filantropi Islam yang berbasis masyarakat menjadi kajian unik di Indonesia, kajian ini erat juga hubungannya dengan masyarakat sipil Islam dalam perspektif teoritis terkenal dari sosok antropolog Robert W. Hefner pada bukunya yang berjudul *Civil Islam* (2000). Amelia Fauzia (2016:8) masyarakat sipil muslim secara sederhana mengacu pada masyarakat sipil atau organisasi masyarakat sipil yang memberlakukan nilai keislaman dalam beberapa konteks seperti insitusi Islam masjid, lembaga wakaf, kelompok tarekat. Salah satunya yaitu PKPU berbasis Islam sebagai lembaga yang sudah lama andil dan turut membantu bangsa Indonesia sejak pasca orde baru 1998 dimana terjadi banyak permasalahan sosial di Ambon, mereka mampu mengisi kekosongan negara dalam pelayanan kesejahteraan. Pada posisi ini masyarakat sipil Islam (PKPU) selalu menjadi aktor penengah (*intermediary*) dalam artian bebas dari pengaruh penguasa yang bertugas mengisi ruang kosong negara dalam kerja-kerja kemanusiaan untuk perubahan sosial bagi kesejahteraan masyarakat. Penggunaan kata “Muslim atau Islam” setelah kata masyarakat sipil sebagai penegasan atau pembeda dengan masyarakat sipil lainnya (Fauzia, 2016: 9).

a. Filantropi Islam sebagai Kekuatan Politik

Amelia Fauzia (2016:1) menjelaskan Muslim di Indonesia dan beberapa belahan dunia lainnya telah lama mempraktikkan beberapa bentuk filantropi seperti zakat, fitrah sedekah, dan wakaf, selain itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana juga sudah dipraktikkan melalui kegiatan kerja bakti, gotong royong, penggalangan dana, dan berderma melakukan kerja sosial. Semua kegiatan tersebut akan memunculkan penguatan makna demokrasi dimana aktivitasnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil untuk menggerakkan lembaga filantropi keagamaan seperti halnya dilakukan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) sebagai institusi yang lahir berbasis masyarakat sipil Islam (*Civil Islam*) hadir untuk kerja-kerja kemanusiaan, awalnya dari aktivis yang hanya melakukan penggalangan dana untuk korban Ambon. Namun, perlu diketahui sejarah pada rezim orde baru sangat membatasi aktivitas filantropi karena menilai adanya kekuatan finansial dari filantropi tradisional (zakat, infaq, shodaqah, dan wakaf) yang dapat membantu kepentingan pemerintah (negara). Dibuktikan dari pidato Presiden Soeharto yang dikutip oleh Amelia Fauzia (2016:6) Soeharto dengan tegas menyampaikan rencananya untuk mendapatkan minimal 2,5 milyar setiap tahun dari hasil pengumpulan zakat, dan dalam teknisnya juga akan dipimpin secara langsung. Dalam hal ini menunjukkan kontestasi antara negara dan masyarakat sipil Islam. Negara ingin mengakomodir finansial yang bersumber dari zakat untuk membantu misi presiden dalam sisi penerimaan negara, namun disisi lain masyarakat sipil khususnya masyarakat

muslim ingin mentransformasikan dalam aspek yang lebih luas seperti filantropi untuk keadilan dan perubahan sosial.

Lain halnya Amelia Fauzia (2016:6) membagi hubungan negara dan masyarakat sipil menjadi tiga periode kekuasaan yang berbeda terkait filantropi Islam seperti: (a) Periode kerajaan Islam yang terjadi sebelum periode Indonesia modern, (b) Periode pemerintahan non-Muslim, yaitu pada masa kolonial, (c) Periode negara sekuler modern, dimana pemerintah dikuasai oleh mayoritas muslim yang terjadi setelah masa kolonial. Pada masa kerajaan Islam raja selalu memberikan kesempatan aktivitas filantropi kepada pemuka agama lokal, baik lembaga wakaf, organisasi tarekat dan lainnya diberikan ruang untuk berkembang independen yang secara tidak langsung sudah melahirkan gerakan kelompok masyarakat sipil (*civil society*). Berbeda pada masa kolonial Belanda notabeneanya adalah non muslim membuat hubungan antara negara dan masyarakat sipil justru berkembang sangat pesat karena pemerintah Belanda tidak ingin ikut campur dengan hal yang terkait filantropi Islam, sementara pada masa Indonesia modern membagi tiga klasifikasi status sosial agama yaitu agama menjadi dasar ideologi, negara menjadi jarak atau masa bodoh karena merupakan hak privasi, dan negara berpisah dengan agama.

Begitulah dinamika filantropi Islam terus mengalami perubahan dan memiliki kekuatan politik apabila hal itu ditujukan langsung untuk merubah tatanan sistem negara ke dalam bentuk negara Islam (NII). Filantropi Islam berpotensi dalam mendukung gerakan sosial, salah satunya dipengaruhi oleh faktor kepercayaan (agama) masyarakat. Faktor keagamaan memiliki

kekuatan politik Islam yang mampu mengkonsolidasi kelompok-kelompok tertentu sehingga akan melahirkan sebuah gerakan sosial yang lebih besar untuk menekan kebijakan pemerintah (negara). Foucault yang dikutip oleh Amelia Fauzia (2016:23) agama adalah kekuatan politik dan reformasi/pembaharuan yang didukung oleh keyakinan keagamaan sifatnya sangat kuat karena membawa tema-tema keselamatan. Maka lahirnya PKPU berbasis Islam atas inisiasi kader/elit PKS memiliki pertahanan kuat dari beberapa kelompok muslim baik muslim modern (bersandar pada nalar) maupun muslim revivalis (memurnikan ajaran Islam) untuk tetap menjaga aktivitas kerja kemanusiaan sebagai mesin pelayanan kesejahteraan partai. Cara kerja PKPU salah satunya melakukan afiliasi dengan beberapa lembaga dakwah Islam yang berada dalam lingkungan kampus atau universitas se-Indonesia. Tujuan utamanya tidak lain untuk melakukan rekrutmen kader potensial yang berada dalam lingkungan kampus, diharapkan mampu untuk menjadi kader muda yang berpotensi di masa depan.

b. Kekuatan Politik Kelompok Reformis

Gerakan politik selalu membutuhkan kekuatan aliansi beberapa kelompok pendukung sebagai mesin teknis operasional yang dipercaya mampu mensukseskan visi misi pada tataran akar rumput (*grass root*). Termasuk salah satu strategi partai berideologi Islam yaitu PKS melakukan afiliasi dengan kelompok aktivis muslim atau organisasi dakwah kampus seperti gerakan tarbiyah yang berada dalam beberapa universitas se-Indonesia. Gerakan tarbiyah merupakan bagian dari kelompok muslim reformis yaitu gerakan yang ingin memurnikan ajaran

Islam dalam lini kehidupan, gerakan ini bertujuan mengislamisasi negara. Kelompok reformis merupakan bagian masyarakat sipil yang akan mempengaruhi gerakan filantropi Islam sehingga hadirnya lembaga filantropi dijadikan sarana sosial dan gerakan dakwah radikal untuk membuat negara Islam Indonesia. Zuly Qodir (2016: 127) menjelaskan PKS lahir dari gerakan tarbiyah dan gerakan tarbiyah lahir awal orde baru. Ia juga menegaskan tokoh dari PKS Helmi Aminudin sebagai ketua Majelis Syuro pernah menjadi Menlu NII (Negara Islam Indonesia) dan sekaligus aktor utama yang menyebarkan gerakan Ikhwanul Muslimin dari Timur Tengah ke Asia Tenggara termasuk salah satunya Indonesia. Upaya untuk memperbaharui Islam di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh kalangan Muslim reformis dan salah satu gerakan reformis yang berpengaruh adalah Ikhwanul Muslimin sangat aktif dalam aktifitas kedermawanan (Fauzia, 2016:13). Artinya kehadiran PKPU yang lahir sejak masa orde baru dari kalangan aktivis kader muslim dapat dikatakan sebagai kelompok reformis yang memiliki kekuatan politik praktis dalam mengkonsolidasikan politik PKS.

Kemunculan gerakan tarbiyah merupakan representasi politik radikal untuk merubah sistem demokrasi menjadi ideologi Islam atau syariat Islam. Meskipun area yang dilakukan kelompok tarbiyah juga menikmati demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat luas dalam prosesnya. Gerakan ini prinsipnya akan selalu menjadikan lembaga PKPU sebagai media sosial untuk mengislamisasi masyarakat dalam gerakan dakwahnya melalui program kerja lembaga kemanusiaan dengan cara

pemberdayaan masyarakat sehingga, dengan semakin banyaknya masyarakat yang merasa terbantu akan mudah menerima sugesti lain dari PKPU termasuk mengikuti paham Islam garis keras.

1.1.3 Filantropi Sebagai Gerakan Oposisi (Perlawanan) Politik

Filantropi merupakan bagian aktivitas sosial masyarakat yang banyak dijalankan beberapa negara khususnya negara Islam (Saudi Arabia, Libya, Yaman, Malaysia, Pakistan, dan Sudan, Turki, dll). Dari ketujuh negara tersebut mewajibkan pelaksanaan satu atau beberapa bentuk zakat dalam ketentuan hukum negara mereka (Fauzia, 2016:12). Tak terkecuali Indonesia sebagai negara sekuler religius yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia juga memiliki kewajiban zakat atas perintah agama Islam bukan zakat atas perintah penguasa (negara). Aktivitas filantropi modern (keadilan sosial) notabennya yang lahir dari filantropi Islam tradisional (zakat, shadaqah, wakaf) memiliki kekuatan finansial yang sangat berpengaruh dalam mendukung kekuatan pembangunan nasional khususnya bidang ekonomi, dan sosial sehingga hal ini mulai disadari pada rezim Soeharto ingin mengambil alih aktivitas filantropi khususnya zakat menjadi pajak untuk negara meskipun berakhir pada tahun 1970. Akhir dari aktivitas itu dikarenakan tidak adanya dukungan militan dari kalangan muslim reformis. Amelia Fauzia (2016:6) Kepentingan memperbarui (mengakhiri pengumpulan zakat nasional) filantropi Islam sangat bersesuaian dengan kalangan Islamis, dimana kelompok ini memiliki agenda untuk mendirikan negara Islam yang akan terus-menerus mendorong proses Islamisasi di semua sektor kehidupan, maka tidak heran mendapat dukungan signifikan dari beberapa kelompok oportunis seperti kelompok Islamis, birokrat

negara, dan partai politik. Sebenarnya yang harus diketahui adanya upaya memperbaiki filantropi Islam di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan muslim reformis radikal seperti *Ikhwanul Muslimin (IM)*, dipimpin langsung oleh Hasan Al-Banna, berasal dari Turki sangat aktif melakukan gerakan sosial khususnya kedermawanan (filantropi) demi melicinkan misi politik untuk mengislamisasi masyarakat dan negara.

Menurut sejarahnya munculnya gerakan *Ikhwanul Muslimin* atas kepentingan politik praktis PKS (Partai Keadilan Sejahtera) sebagai organisasi yang lahir dari kelompok gerakan tarbiyah (jamaah pendidikan). Gerakan ini awalnya dimulai pada tahun 1984 dipelopori oleh Helmi Aminuddin yang pernah menjabat sebagai ketua Majelis Syuro PKS serta pernah menjadi Menlu NII (Negara Islam Indonesia) Komando Adah Djaelani mengadopsi gerakan Ikhwanul Muslimin dari Timur Tengah (Qodir, 2013:128). Selepas Ia kembali ke Indonesia langsung mengibarkan bendera Ikhwanul Muslimin dan menyebarkan aliran radikal tersebut khususnya di kawasan ibu Kota DKI Jakarta. Gerakan Islam garis keras ini sangat menentang demokrasi dan ingin mengislamisasi negara Indonesia. Dalam riset Anthony Bubalo, Greg Fealy, dan Whit Mason (2012:52) menjelaskan ironisnya kebijakan-kebijakan orde baru terhadap Islam dalam keberagaman politik justru memberi keuntungan kepada gerakan tarbiyah, dimana rezim Soeharto sangat mendukung dan mewajibkan mahasiswa mengambil ‘pelatihan spiritual’ seperti Rohani Islam (Rohis) sebagai bagian studi mahasiswa, dan sangat melarang (menutupi keras) perkumpulan mahasiswa dan organisasi berbau politik di kampus (kecuali mendukung Golkar). Artinya rezim ini sangat khawatir gerakan politik dan Islamisme dari kalangan mahasiswa dapat memberi ruang konsolidasi yang akan

menghilangkan otoritas Soeharto dalam kursi kepemimpinannya, sebagai presiden Republik Indonesia. Maka jalan alternatif strategis yang ditempuh oleh kelompok reformis (radikal) yaitu memanfaatkan peluang gerakan tarbiyah menjalankan misi senyap untuk mengkuadeta Soeharto. Gerakan tarbiyah meskipun dipandang rezim apolitis, tapi terbukti sangat lincah secara tersembunyi mampu mengakomodir anggota lainnya untuk penyelamatan posisi lembaga kemahasiswaan kampus yang sejatinya lembaga tersebut menaungi kegiatan organisasi internal kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan sebagainya. Aksi lainnya selain mengawasi lembaga kemahasiswaan juga mengawasi organisasi Lembaga Dakwah Kampus (LDK) seperti gerakan mahasiswa KAMMI yang didukung atas bantuan Orde Baru.

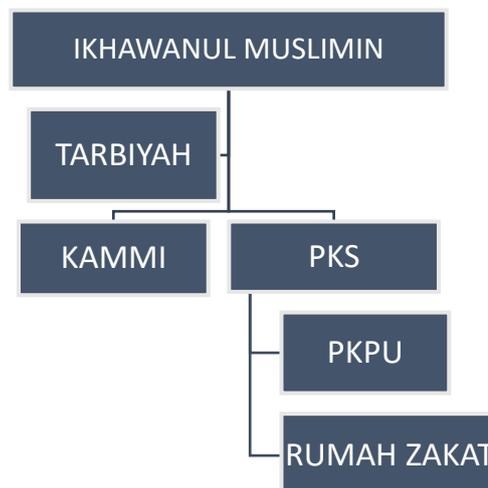
Proses gerakan dakwah tarbiyah dalam mengawasi LDK masif dan eksklusif. Pemimpin gerakan Tarbiyah sangat berhati-hati menyusun strategi untuk menghindari mengkritik rezim atau secara terbuka mengorganisir protes terbuka, karena khawatir akan tertangkap pihak keamanan yang dianggap sebagai kelompok oposisi (Bubalo, Fealy, Mason, 2012:53). Ia juga menjelaskan mencari zona aman menjadi pilihan utama dalam mengantisipasi kondisi genting, dan membuat pertemuan terbatas dengan struktur organisasi utama Tarbiyah (*usrah*) momen ini bukan hanya digunakan mempelajari politik Islam namun juga dipersenjatai oleh kajian cara-cara mempertajam kritik rezim Orde Baru dan kelompok muslim yang gagal menciptakan masyarakat Islam (NII). Doktrinisasi kalangan radikal Ikhwanul Muslimin kepada jamaah Tarbiyah yang anggotanya mayoritas mahasiswa sebenarnya sebagai sumber penyakit di Indonesia, yang awalnya hanya terpusat di universitas negeri yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB) karena dimotori oleh

sosok Nur Mahmudi Ismail menjabat sebagai dosen sekaligus ketua PK (Partai Keadilan) saat ini sudah menyebar ke beberapa universitas negeri dan swasta seluruh Indonesia. Model aktivitas kelompok tersebut sangat terorganisir sehingga dapat langsung melakukan proses rekrutmen anggota yang akan dibentuk menjadi kader potensial masa depan dari kalangan aktivis mahasiswa muslim. Kalangan reformis selalu menginginkan negara Islam dan menentang demokrasi, sementara aktivitas mereka sedang menikmati panggung demokrasi itu sendiri seperti partisipasi dengan rezim, musyawarah dan ruang kebebasan dalam melakukan dakwah.

Sehingga adanya momentum penghujung tahun 1997 terjadi adanya krisis finansial Asia yang juga berimbas ke Indonesia pada September 1997 menyebabkan stabilitas negara terganggu seperti turunnya mata uang rupiah terhadap dolar, banyaknya pengangguran, tingginya biaya hidup dan dibarengi dengan kerusuhan sosial yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Dan hilangnya kepercayaan publik karena Soeharto lamban menangani permasalahan disebabkan kondisi Soeharto menderita *stroke* ringan pada Desember 1997. Pada awal 1998 kondisi tersebut mencerminkan suasana rezim yang lemah, sehingga pimpinan Tarbiyah langsung membahas untuk seruan aksi politik. Kelompok tersebut tidak ingin kehilangan momentum reformasi harus dipelopori oleh Islam atau tidak sama sekali, maka pada acara konferensi LDK April 1998 pimpinan sepakat melakukan konsolidasi dengan LDK membuat organisasi pergerakan mahasiswa KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) untuk melakukan perlawanan rezim yang berkuasa pada masa Orde Baru (Bubalo, Fealy, Mason, 2012).

Secara tidak langsung lahirnya KAMMI merupakan alat politik Tarbiyah yang sangat berhasil menumpas rezim otoriter. Merasa memiliki jasa besar pada era orde baru itulah menjadi dasar filosofis gerakan KAMMI tetap eksis sampai saat ini, gerakan ini bukan hanya melakukan kajian politik Islam di lingkungan mahasiswa kampus namun, melaksanakan aktivitas kedermawanan (filantropi) untuk masyarakat luas seperti penggalangan dana (*fundraising*) untuk beberapa wilayah yang terjadi bencana, melalui mitra kerja seperti lembaga filantropi PKPU sebagai lembaga yang lahir atas jasa kader PKS. Aktivitas kemanusiaan yang tetap berada dalam zona wilayah partai (PKS/PK) itulah yang disebut dengan adanya politisasi filantropi. Adapun untuk mengetahui arah gerakan politik filantropi yang dijalankan oleh PKPU berikut akan dijelaskan secara lengkap.

1. Gerakan politik filantropi dilahirkan dari hubungan kultural yang berada dalam lingkaran PKS sebenarnya dilahirkan dari gerakan Islam Timur Tengah. Adapun secara kultural dapat dilihat dalam analisa bagan di bawah ini:



Sumber: Diolah oleh Penulis (2018)

Ilustrasi di atas dapat di jelaskan hubungan hierarkis kultural yang sudah lama hadir di Indonesia dan jarang disadari oleh masyarakat yaitu Ikhwanul

Muslimin merupakan gerakan reformis atau Islam garis keras (radikal) yang berasal dari Turki didirikan oleh Hasan Al-Banna 1928. Amelia Fauzia (2016:13) gerakan ini menganggap negara dan masyarakat sebagai sebuah kesatuan sistemik dan Indonesia dalam kegiatan filantropi Islam Pasca Orde Baru menunjukkan adanya pengaruh dari gerakan kebangkitan ini. Realita di lapangan menunjukkan bukti otentik dimana tokoh politik Indonesia Helmi Aminuddin sebagai ketua Majelis Syuro PKS selaku pelopor awal penganut gerakan tersebut. Selain itu sosok intelektual Imaduddin Abdulrahim (Bang Imad), Rakhmat Abdullah dan Abdi Sumaiti (Abu Ridho) juga merupakan tokoh yang berhasil merancang lahirnya kelompok belajar informal yang saat ini disebut sebagai gerakan Tarbiyah (Bubalo, Fealy, Mason, 2012:49).

Kelompok Tarbiyah merupakan sebuah gerakan Orde Baru yang berhasil menumpas rezim Soeharto dengan cara mengkonsolidasi gerakan dakwah Islam di kalangan mahasiswa Muslim. Dalam gerakan ini kajian bukan hanya tentang Islam seperti *halaqah* (diskusi), *Liqa* (pertemuan) yang membahas teks Islam, *fiqih*, shalat, dan puasa bersama namun, juga melakukan aktivitas filantropi seperti penggalangan dana bantuan bencana dan komersial yang di ajarkan cara berwirausaha (*entrepreneurship*) melalui gerakan dakwah kampus, aktivitas ini berjalan sampai saat ini dan diadopsi oleh beberapa organisasi Islam lainnya. Ruang lingkup dengan iklim religius tersebut justru mendapat dukungan penuh dari Soeharto yang terbukti mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti Rohis dalam aktivitas studi Kampus (Bubalo, Fealy, Mason, 2012:52). Pemerintah kecolongan yang tidak mengetahui adanya misi terselubung dibalik aktivitas kelompok Tarbiyah yang dipandang menjalankan misi dakwah Islam dikalangan mahasiswa

kampus mampu membangun gerakan konsolidasi yang ditandai lahirnya KAMMI sebagai pelopor utama reformasi dari kalangan aktivis Islam. Dalam waktu yang pendek KAMMI mampu mengakomodir mahasiswa untuk melakukan aksi protes yang menuntut turunnya Soeharto dan mampu melakukan kerjasama dengan kelompok mahasiswa lainnya dari organisasi kiri dan non muslim (Bubalo, Fealy, Mason, 2012:54).

Kiprah gerakan KAMMI yang berhasil melakukan reformasi membuat adanya kepercayaan lebih di tubuh organisasi Tarbiyah. Sehingga hal tersebut diyakini oleh pimpinan KAMMI semestinya anggota Tarbiyah tidak pasif secara politik dan tidak membatasi diri mereka pada aktivitas dakwah keagamaan ketika bangsa menjadi gerbang utama reformasi (Bubalo, Fealy, Mason, 2012:54). Maka setelah aktivitas *outputnya* lahir sebuah Partai Keadilan (PK) pada 20 Agustus 1998 sampai tahun 2002 dan berubah nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak 2002 sampai sekarang partai yang membawa salah satu visi peduli ini terkenal menjadi partai yang pragmatis dan oportunistis.

Istilah model cari aman layak dilabelkan kepada PKS yang lamban dalam mengambil keputusan politik. Zuly Qodir (2013:136) ketika pemilu 2004 sampai detik-detik terakhir PKS baru memberikan sikap untuk mendukung salah satu calon kandidat presiden padahal partai lainnya sudah memutuskan sikap dalam mendukung presiden dan wakilnya. Zuly juga menegaskan oportunistis dan pragmatis merupakan jurus yang selalu dimainkan PKS sejak kealahannya pada pemilu 1999 pasca Orde Baru. Namun, uniknya karena berbasis partai Islam PKS tetap menggunakan konsep Islam dalam semua agenda politiknya terbukti dengan melahirkan lembaga filantropi Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dan Rumah

Zakat yang dipercaya sebagai amal nyata kader muslim PKS. Meskipun secara kelembagaan antara PKS dengan PKPU dan Rumah Zakat terpisah karena tuntutan undang-undang namun, secara tidak langsung terdapat kemungkinan misi terselubung seperti halnya pada masa Orde Baru menggulingkan kekuasaan, dan saat masa reformasi ingin mendominasi jatah kursi legislatif maupun eksekutif melalui pelayanan kesejahteraan berbasis pemberdayaan dan pelayanan kesejahteraan kepada masyarakat khususnya ekonomi kebawah, sehingga dengan kekuatan jalinan relasi yang lebih kuat mampu mengiring masyarakat untuk bersama mendukung PKS dalam kontestasi politik elektoral (pemilu).

1.1.4 Filantropi Sebagai Gerakan Politik Profetik

Lahirnya gerakan filantropi yang awalnya bersumber dari filantropi Islam menyebabkan gerakan ini memiliki korelasi dengan gerakan profetik. Gerakan profetik merupakan sebuah gerakan yang diistilahkan dengan semangat kenabian, atau dalam hal ini merujuk pada dorongan hati nurani berdasarkan ideologi Islam. Filantropi sebagai gerakan politik profetik berusaha melahirkan pembebasan dan pemberdayaan sumberdaya manusia untuk terlibat dalam kerja sosial-kemanusiaan. Hal ini dibuktikan oleh proses pembangunan yang dilakukan PKPU berbasis pemberdayaan masyarakat dengan beberapa metode seperti pembuatan klaster berdaya (*kader berdaya, kampung berdaya, dan keluarga berdaya*) yang akan menjadi penguatan modal sosial.

Kekuatan modal sosial mendukung tercapainya demokrasi sosial yang berhasil dilakukan oleh PKPU sebagai lembaga filantropi berbasis masyarakat sipil. Sedangkan keberhasilan demokrasi sosial akan mendukung perubahan sosial dan

ketika perubahan tersebut berhasil dilakukan oleh lembaga filantropi secara tidak langsung peran negara semakin berkurang digantikan posisi masyarakat sipil dalam pelayanan penyedia kesejahteraan. Asas profetik menjadi penguatan berjalannya modal sosial dalam praktik filantropi. Korelasi antara profetik dan filantropi yaitu profetik berbicara dalam tataran ideologi Islam sementara, filantropi dalam tataran praktis kerja-kerja sosial yang saling bersinergi antar lembaga. Berikut akan dijelaskan karakteristik lembaga filantropi sejak orde baru sampai reformasi:

1. Karakteristik Gerakan Filantropi Orde Baru dan Reformasi

Hadirnya PKPU sejak masa orde baru sampai dengan masa reformasi meninggalkan beberapa poin penting mengenai perjalanan sejarah kelahiran lembaga filantropi di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari karakteristik kinerja PKPU dari beberapa kurun waktu yang berbeda. Pada masa orde baru gerakan yang dilakukan oleh PKPU melakukan ekspedisi nusantara dari daerah-daerah di Indonesia yang terkena dampak bencana alam dan bencana sosial, dalam aktivitas ini PKPU intensif dengan metode *charity dan fundrising* untuk membantu masyarakat menangani permasalahan kesejahteraan sosial. Sementara, pada masa reformasi, aktivitas filantropi yang dijalankan oleh PKPU cenderung jauh lebih luas dengan metode pemberdayaan dan advokasi masyarakat. Maka, untuk mengetahui perbedaan karakteristik PKPU dari masa orde baru sampai reformasi penulis membagi dalam bentuk berikut: Table 1.3 perbedaan filantropi orde baru dan reformasi:

No	Masa orde baru	Reformasi
1	Belum adanya pelembagaan filantropi (di bawah kepemimpinan tradisional rezim Soeharto)	Adanya pelembagaan filantropi
2	Filantropi tradisional (zakat, infaq, shodaqah)	Transformasi filantropi modern (keadilan sosial)

3	Adanya dinamika antara negara dan agama	Kontestasi negara dan masyarakat sipil
4	Aktivitas sebatas <i>charity</i>	Filantropi untuk perubahan sosial
5	Awalnya hanya sebuah yayasan	Lembaga filantropi nasional
6	Non Demokratis	Demokratis

Sumber: diolah oleh penulis (2018).

Pembagian karakteristik lembaga filantropi di atas sebagai upaya untuk lebih memahami bahwa aktivitas filantropi selalu mengalami dinamika setiap waktu dan membutuhkan hal baru yang lebih inovatif dalam upaya pembangunan kesejahteraan jangka panjang. Eksistensi PKPU sejak masa orde baru sampai reformasi membuktikan adanya kekuatan legalitas lembaga dengan kekuatan *soft politic* memberikan distribusi pelayanan kesejahteraan disaat negara mengalami *less of capacity* (lemah). Kontribusi PKPU sejak masa orde baru sampai reformasi sebagai salah satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia yang dilahirkan oleh partai politik (PKS) membuktikan bahwa dalam hal ini peran filantropi politik bukan hanya permasalahan kemanusiaan (*humanity*) tetapi, juga untuk alat perebutan kekuasaan (*power*). PKPU sebagai lembaga yang netral *disetting* dengan sinergitas partai politik untuk membantu beberapa segmen mitra kerja sosial-kemanusiaan.

Kehadiran PKPU sejak masa orde baru yang dibuktikan dengan jasanya selama membantu korban di Poso dan Ambon menjelaskan bahwa kekuatan masyarakat sipil dapat mengisi kekosongan negara, sehingga wajar eksistensinya sampai pada reformasi ini diapresiasi banyak pihak sebagai lembaga yang konsisten dan memiliki kinerja profesional di bawah PBB. PKPU di dalam menjalankan aktivitas program kerjanya menjalin hubungan ideologis partai sehingga mitra kerja di awal terbentuk sampai saat ini cenderung berbasis keislaman.

Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh PKPU sangat potensial mengingat beberapa tokoh besarnya seperti Bagus Suryama Majana Sastra merupakan elit PKS, sehingga hal ini sangat strategis mendukung arah gerakan misi partai. PKPU sebagai irisan parpol dijadikan alat politik yang dapat bergerak lebih luas dalam distribusi kesejahteraan di masyarakat. Aktivitas PKPU mampu mengangkat permasalahan sosial dan membuat advokasi jangka panjang dengan sistem kerja yang kooperatif dari pelaku filantropi. Isu permasalahan sosial menjadi sangat populis untuk dinarasikan dalam politik marginal sehingga dalam hal ini mengundang antusiasme beberapa kelompok untuk turut serta merespon aktivitas filantropi baik insidental maupun berkelanjutan.

1.1.5 Politisasi Gerakan Filantropi

Gerakan filantropi merupakan sebuah gerakan sosial yang dilakukan atas dasar kemanusiaan. Gerakan sosial berbasis filantropi saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat sipil dalam memperjuangkan kesejahteraan sosial masyarakat yang membutuhkan. Isu kemiskinan menjadi suatu hal seksi yang mulai digagas kelompok masyarakat sipil dalam membuat isu populis sehingga dapat memperjuangkan masyarakat marginal yang membutuhkan jaminan kesejahteraan dari pemerintah. Sayangnya, seiring dengan kemunculan lembaga filantropi yang tengah memperjuangkan masyarakat, kondisi politik terus mengalami dinamika sampai hal ini dipraktikkan oleh partai yang konsisten dalam misi kemanusiaan yaitu PKS menyentuh ranah sosial melalui lembaga filantropi PKPU. Dalam ranah ini peran politik filantropi untuk kemanusiaan, juga memiliki fungsi lain yaitu untuk kekuasaan.

Politisasi lembaga filantropi merupakan jalan alternatif yang dilakukan PKS sebagai upaya dalam menjalankan misi keumatan dan kepedulian atas kerja-kerja sosialnya. Gerakan humanis yang dilakukan PKS bukan hanya dalam skala pendek melainkan, program jangka panjang dalam rangka konsolidasi dan kaderisasi potensial yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan masa depan. PKS merupakan partai militan yang berhasil mengakomodir organisasi sayap partai untuk turut membesarkan nama partai. Dalam hal ini, politisasi gerakan filantropi menjadi isu terbaru yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah untuk cermat dalam setiap pembuatan kebijakan publik.

Kehadiran lembaga filantropi PKPU memberikan politik kesejahteraan dalam makna yang baru, hal ini dipengaruhi oleh wajah depan karakteristik PKPU yang dapat berjalan lebih luas namun, tidak memiliki ketegasan sikap politik yang jelas. Sementara, dengan wajah belakangnya PKPU memiliki pragmatisme yang dilakukan oleh pelaku filantropi berafiliasi politik dengan parpol PKS. Hubungan ideologis kultural yang dijalankan masih sangat kentara, meskipun secara kelembagaan menyatakan sikap independen. Jaringan ideologi yang dijalankan oleh PKPU masih berkiblat pada jaringan PKS. Maka, sikap politik lembaga filantropi secara internal masih sejajar dengan kekuatan PKS.

Eksistensi PKPU dengan kerja-kerja kemanusiaannya tidak lepas dengan kontribusi jaringan PKS yang selalu sedia, sigap, dan tepat dalam membantu sebagai mitra strategis yang dapat menjamin biaya operasional PKPU. Kehadiran PKPU di Indonesia sejak masa orde baru sampai era reformasi membuktikan bahwa kepedulian dan marketing politik yang dijalankan dalam agenda misi keumatan PKS dalam skala jangka panjang. PKPU dalam perjalanannya membuktikan

mampu menjadi lembaga sosial besar, meskipun ada peran PKS di belakangnya. PKPU dengan agenda pembangunan kesejahteraan sosialnya secara tidak langsung juga mampu menjalankan aktivitas politik kesejahteraan, yang berusaha terus mengadvokasikan kepentingan masyarakat dengan narasi-narasi politik marginal. Peran PKPU sebagai sektor ketiga berusaha mengisi kekosongan yang gagal disediakan oleh negara sebagai aktor utama. Daya tahan aktivitas PKPU sebagai akto *intermediary* atau aktor ketiga dalam jaminan kesejahteraan membuktikan bahwa negara mulai kehilangan peran.

1.2 IDEOLOGI DAN PRINSIP GERAKAN FILANTROPI ISLAM

Konsep ideologi dan prinsip gerakan filantropi Islam setidaknya didukung oleh beberapa hal diantaranya yaitu ideologi *soft power* PKPU dan PKS, Politik kesejahteraan berbasis filantropi, Filantropi Islam dan demokrasi, serta pengetahuan kesejahteraan untuk pemberdayaan ekonomi lokal. Beberapa hal tersebut saling berkorelasi dan mendukung dalam gerakan filantropi Islam sebagai berikut:

1.2.1 Ideologi *Soft Power* PKPU dan PKS

Banyak yang belum mengetahui kajian politik kesejahteraan berbasis lembaga filantropi khususnya relasi antara PKPU dan PKS. Tulisan di atas sudah menjelaskan hubungan bahwa PKPU secara tidak langsung merupakan anak kandung PKS yang sengaja dipisahkan dalam sistem kelembagaan untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam praktik kerja kemanusiaan. Dalam beberapa konsep profil PKS ada sebuah slogan *bersih, peduli, profesional*. Dari sebuah makna selogan inilah dapat diinterpretasikan menjadi visi utama kepedulian partai terkait masalah sosial dan kemanusiaan.

Selanjutnya menurut Muhammad Syafi'i (2018) selaku DPD Kota Yogyakarta juga menjelaskan dalam visi misi 2015-2020 PKS itu berkhidmat untuk bangsa dan negara yang artinya berkhidmat merupakan pelayanan termasuk di dalamnya kepedulian terhadap problematika sosial maupun kemanusiaan dan juga sudah sejak zaman dahulu karakter itu dibentuk ketika lembaga masih bernama Partai Keadilan (PK). Dahulu kampanye-kampanye selalu dengan pengumpulan massa, rapat akbar, pidato, dst. PKS sudah mengawali sejak tahun 1998 semenjak masih menjadi PK. Upaya yang dilakukan PKS untuk selalu dekat dan melayani masyarakat salah satu polanya seperti memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Disamping, PKS yang berkampanye dengan distribusi brosur, gerakan yang dilakukan oleh kader khususnya tenaga medis turut membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara gratis yang sumber anggarannya berasal dari swadaya kader. Hal tersebut diyakini menjadi amal bhakti kader PKS.

Selain itu gerakan PK yang cukup berpengaruh untuk Indonesia khususnya dari kader-kader partai yang tidak bisa melihat masalah kebutuhan sosial yang terjadi di Ambon dan Poso mampu melahirkan PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat). Semua itu merupakan bagian amal nyata kader PKS yang kemudian mewujudkan kerja-kerja kemanusiaan yang tidak terikat partai. Syafi'I (2018) juga menegaskan kader yang masih berkhidmat tidak berada dalam struktural partai namun, berada dalam lembaga filantropi (PKPU). Meskipun demikian, jelas tidak bisa dinafikan hubungan ideologis Islam kedua lembaga tetap menjadi landasan utama arah gerakannya.

Secara teknis hubungan menarik yang dilakukan oleh PKS selalu siaga, cepat dan sigap dalam kondisi darurat melakukan tanggap bencana, akan tetapi

partai memiliki keterbatasan khusus terkait terbatasnya anggaran. Maka PKS selalu memberikan ruang kepada PKPU sebagai lembaga sosial untuk masuk dalam upaya rehabilitasi di lokasi bencana. Kolaborasi kelembagaan yang dilakukan oleh PKS dan PKU masih sangat kuat meskipun hanya dalam praktik kerja kemanusiaan dengan kedekatan emosional pelaku filantropi. Upaya sinergi melalui jalur kulturalpun menjadi solusi alternatif bagi PKS yang membuka jalan untuk lembaga sosial (PKPU) masuk di area utamanya. PKS meyakini pemisahan kelembagaan tersebut dilakukan untuk memberikan keleluasaan lembaga PKPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dimana partai tidak boleh masuk dalam aktivitas sosial terlalu dalam, sedangkan lembaga sosial bisa memainkan peran luas dalam gerakan kampanye dan penggalangan dana dengan metode marketingnya lebih bisa diterima dan mendapat banyak dukungan kalangan masyarakat.

Konsep kerja yang dilakukan PKS artinya hanya pada tahap darurat (*emergency*) saja, sama halnya ketika pembentukan beberapa lembaga filantropi internal partai *Crisis Center For Rohingya* sebagai upaya dalam memberikan penekanan kepada pemerintah dalam merespon isu kemanusiaan Rohingya. Isu-isu insidental selalu masif digalakkan oleh PKS sebagai partai Islam. Meskipun, sifatnya hanya sementara namun, gerakan yang dilakukan merupakan gerakan politik filantropi dalam memberikan jaminan pelayanan kesejahteraan sosial. Komitmen PKS dan PKPU merupakan satu kesatuan politik ideologis Islam yang sudah menjadi pondasi awal kesepakatan politik kedua lembaga tersebut. Saling menjaga integritas dan berupaya mendekat kepada masyarakat dengan berbasis pemberdayaan PKPU merupakan bagian motif *soft politic* yang akan sulit diidentifikasi masyarakat akan profesionalitas sebuah lembaga filantropi.

Prinsipnya semua orang menyukai bentuk pelayanan kesejahteraan yang maksimal baik itu berbasis masyarakat sipil maupun negara yang memiliki kewajiban utama dalam memberikan jaminan pelayanan kesejahteraan. Kedua lembaga tersebut mempunyai prinsip kerja sebagai berikut:

- a. **Prinsip Kinerja PKS dalam Praktik Filantropi** dalam mewujudkan visi PKS yang selalu berkhidmat untuk memberikan pelayanan kesejahteraan PKS memiliki strategi kultural yang selalu bekerja dengan sistem atas bawah. Menurut Syafi'i (2018) artinya di dalam tubuh lembaga PKS bekerja secara teknis dalam memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat yang menjadi korban, sementara lembaga yang di parlemen turut membantu menyuarakan (mengartikulasikan) kepada pemerintah dalam memastikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Nasional bekerja cepat dalam pelayanan sosial-kemanusiaan. Sistem tersebut merupakan cara alternatif berjalannya proses politik. Bentuk tugas pokok partai politik yang bergerak dalam intervensi kebijakan mencerminkan PKS menjalankan misi startegisnya dalam bidang politik kesejahteraan sosial. Dalam distribusi bantuan pun PKS berjalan ideologis (sektariat) seperti dalam ungkapan Syafi'i (2018) menjelaskan:

“Satu tahun lalu yang terjadi misalnya pada saat badai siklon cempaka, PKS langsung menggalang dana di depan kantor DPD DIY baik uang, maupun barang, dan penyalurannya pada saat daruratpun dilakukan dengan jaringan-jaringan PKS yang ada di wilayah sasaran. Penerimaannya bukan masyarakat umum melainkan masyarakat yang sudah difasilitasi oleh kader PKS setempat”.

Menjadi dasar utama bahwa langkah-langkah kongrit yang menjadi tanggungjawab bersama khususnya dalam kegiatan filantropi dengan langkah-langkah politik yang menjadi tanggungjawab partai politik juga dilakukan.

Sehingga dalam hal ini PKS memiliki bukti lapangan yang otentik perihal kondisi real masyarakat untuk menjadi bahan rekomendasi dalam menekan kebijakan pemerintah ketika kurang cepat dalam memberikan pelayanan sosial. Komitmen PKS memiliki langkah strategis dalam membantu pemerintah melalui aktivitas filantropi, meskipun tanggungjawab utamanya berada pada pemerintah, di era kontemporer ini merupakan fenomena kontestasi politik filantropi parpol yang dilakukan dengan metode praktik kerja sosial.

1.2.2 Politik Kesejahteraan berbasis Filantropi di PKPU Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta

Awal sejarah sebagai faktor utama pengaruh PKPU menjalin hubungan kultural bermuatan politik praktis. Hubungan yang dijalankan oleh PKS sebenarnya secara tidak langsung melibatkan peran PKPU dalam membantu misi keumatan. Namun, peran PKPU tidak nampak kepermukaan melainkan Organisasi Sayap Partai (OSP) dari segmen mahasiswa Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan beberapa forum lembaga dakwah kampus lainnya yang turut serta membantu arah sinergitas PKPU dan PKS. Peran KAMMI hanya menjadi aktor penggerak dalam ranah akar rumput, sebagai OSP mampu menjadi fasilitator PKS dan PKPU yang masih dalam satu ideologi politik Islam.

Menjadi titik terang fenomena tahun politik yang dimuat dalam website partai menyebutkan intensitas PKS dalam merespon masalah kemanusiaan khususnya bencana alam di Lombok (2018) sangat cepat dan tepat sasaran bahkan menambah jumlah posko bantuan serta logistik. Ungkapan Nur Mahmudi Ismail dalam buku Hassan (1998:36) menegaskan bahwa aktivis muslim cenderung

menggunakan momentum sebagai peluang dakwah strategis contohnya pembinaan-pembinaan masyarakat umum dan pendirian lembaga sosial serta pendidikan. Artinya jelas dapat dibenarkan jika lahirnya PKPU merupakan wujud gerakan politik dalam rangka akselerasi dakwah Islam untuk konsolidasi. Selain itu juga Rumah Zakat yang diakui sebagai hasil amal nyata selama di Ambon berasal dari DSUQ (Dompot Sosial Umul Quro). Hal ini diungkapkan secara tegas oleh Muhammad Syafi’I selaku ketua DPD PKS Kota Yogyakarta:

“Dalam Slogan PKS ada tulisan bersih, peduli, profesional. Jadi disitu ada kata peduli. Upaya kami untuk dekat dan melayani masyarakat salah satunya mendirikan sosial disamping kampanye, kami memberikan pelayanan melalui swadaya kader. Jiwa kader yang tidak bisa tinggal diam melihat fenomena kebutuhan masyarakat pada saat itu, mulai dari kerusuhan terutama Ambon 1998 mendekati reformasi, Poso. Itulah lahir dari amal nyata kader PK melahirkan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Kemudian muncul juga yang lebih intens waktu itu yang di Ambon DSUQ (Dompot Sosial Umul Quro) yang kemudian menjadi Rumah Zakat. Itu bagian amal nyata kader PKS. Kemudian mewujudkan kerja-kerja mereka dalam bentuk lembaga-lembaga sosial yang tidak terikat oleh partai. Karena kalau partai ada hambatan peraturan perundang-undangan terbatas dan tidak bisa kesemua segmen termasuk segmen kemanusiaan dan sosial.” Ungkap Syafi’I (2018).

Arah distribusi pembangunan kesejahteraan PKPU dalam praktik kesehariannya memang sangat berafiliasi politik praktis. Dinamika gerakan dilakukan masih berkiblat pada strategi lama politik PKS yang cenderung memainkan misi keumatan dengan memanfaatkan aktivis muslim sebagai kader muda dipercaya dapat menjadi mesin partai. Selanjutnya arah PKPU pembangunannya juga memberikan arah gerakan dakwah Islam yang lebih masif dalam merespon isu kristenisasi. Peluang ini diyakini sebagai misi dakwah yang

paripurna karena dapat mengajak bersama-sama menjadi muslim dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Artinya semakin banyak orang yang masuk Islam maka semakin kuat pertahanan dakwah Islam dan memberikan keuntungan dalam rangka konsolidasi politik. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana dinamisasi politik kesejahteraan dalam konsep demokrasi sosial. Berikut akan dijelaskan fonemena politik kesejahteraan berbasis filantropi dan bentuk konsolidasi politik filantropi yang terjadi di lembaga PKPU cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

1. Fonemena Politik Kesejahteraan berbasis Filantropi

Politik merupakan suatu hal yang dinamis mengikuti arah perkembangan zaman. Perkembangan politik akan selalu dibenturkan dengan permasalahan sosial yang ada di masyarakat, salah satunya isu kesejahteraan membuat banyak ketimpangan multidimensi di Indonesia. Pengaruh utama ketimpangan ini yaitu adanya pengaruh politik oleh dinamika rezim kekuasaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Tapiheru dan Mas'udi (2018:19) menerangkan lintasan dinamika kekuasaan, kesejahteraan, dan demokrasi Indonesia saling berkorelasi di tengah krisis kepercayaan kepada pemerintah (*state*). Dia juga menambahkan kesejahteraan telah menjadi isu sentral jauh sebelum Indonesia dinyatakan merdeka. Artinya sebenarnya kondisi inilah sebagai gambaran historis kultur sosial dan politik yang ada di Indonesia. Kesejahteraan menjadi suatu hal yang harus di produksi dan distribusikan. Robinson Hadiz (2004) dalam Tapiheru dan Mas'udi (2018:19) prinsipnya kesejahteraan sebagai bagian integral dari ideologi pembangunan. Ideologi harus tetap dipertahankan demi cita-cita bangsa Indonesia untuk memberikan jaminan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Selain itu kesejahteraan menjadi barometer kategori sebuah negara apakah negara miskin, tertinggal, berkembang atau maju. Kesejahteraan menjadi unsur terpenting dalam aspek kehidupan masyarakat, keberlangsungan kehidupan akan berjalan dengan seimbang jika pemerintah menjamin aspek ini.

Melihat masalah banyaknya ketimpangan sosial yang terjadi membuat kondisi ini menjadi sebuah momentum dalam rangka *charity* (kedermawanan) yang dilakukan oleh beberapa kelompok lembaga baik lembaga filantropi nasional, partai politik, *Non Government Organization* (NGO), *Civil Society* (CSO), lembaga keagamaan, dan komunitas sosial lainnya yang mempunyai visi kemanusiaan. Salah satunya lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) merupakan sebuah lembaga filantropi nasional memiliki kekuatan, komitmen dan mitra kerja yang baik dilevel Internasional. Sistem pembangunan PKPU mampu membangun kekuatan *bottom up* (*bawah ke atas*) yang dapat mengakomodir sumberdaya manusia berbasis Islam dari kalangan *grassroot* (akar rumput). Kesuksesan praktik kinerja yang dijalankan PKPU ternyata sangat dipengaruhi oleh arah gerakan afiliasi politik khususnya dari organisasi sayap partai. Hal ini juga secara tegas diungkapkan oleh Abdul Rais Kaharuddin (2018) selaku anggota bidang kemitraan PKPU Cabang DIY dalam wawancara sebagai berikut:

“Kita gerakan mitra-mitra bukan PKPU yang turun tangan. Misalnya yang turun itu teman-teman LDK, HMJ, temen-temen BEM di kampus-kampus mereka menggalang dana dan komunitas-komunitas yang biasanya kerjasama diserahkan ke PKPU. Nanti kita kirimkan ke tempat bencana. Sekarang PKPU pusat juga sudah Mou dengan DMI (Dewan Masjid Indonesia) persatuan masjid. Bahwa kalau masjid menggalang dana masjid-masjid itu disalurkan lewat PKPU dicabang-cabang terdekat. Misalnya Jogja di PKPU cabang Jogja”.

Dalam ungkapan tersebut menunjukkan secara jelas bagaimana kekuatan basis keislaman mampu menjadi sarana konsolidasi politik dalam kerja lembaga filantropi (kemanusiaan). Praktik ini diyakini menjadi misi strategis khususnya tim marketing filantropi. Mereka melihat prospek jangka panjang (*sustainable*) dan hal tersebut sangat sesuai guna mendukung kesuksesan program kerja tahunan PKPU. Kekuatan donatur ini menjadi kunci utama keberlangsungan program lembaga karena kaitannya dengan anggaran dana. Hal ini juga senada dengan ungkapan Munthori (2018) selaku ketua cabang PKPU DIY:

*“Permasalahan PKPU banyak. Pertama **pendanaan** kami belum punya usaha sendiri yang menopang, berbeda seperti Sampurna foundation, itu sudah besar, duitnya banyak. Mereka punya lembaga sosial dan sebagainya. Walaupun kami berusaha properti yang nanti bisa mendukung kinerja. Kedua dari sisi SDM kadang 2 bulan keluar. Banyak kendalanya. Walaupun secara kelembagaan dari SDM ada pelatihan, dll. Ketiga proses birokrasi yang menjadi kendala dalam perumusan perizinan. Pengumpulan donasi karena memang pengumpulan donasi dari dinas sosial menerapkan undang-undang uang dan barang tahun 1961. Keempat di masyarakat bagaimana partisipasi masyarakat”.*

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa peran donatur menjadi faktor kunci keberlangsungan operasional lembaga filantropi khususnya PKPU. Dalam hal ini secara kelembagaan lembaga filantropi (kemanusiaan) saling bersaing kompetitif dalam merespon isu kesejahteraan sosial. Kesejahteraan menjadi isu nasional dikontestasikan beberapa pihak khususnya partai politik yaitu PKS yang sangat fonemenal di Indonesia sebagai partai politik yang pertama kali datang di saat kondisi darurat khususnya bencana alam seperti yang disebutkan oleh Syafi'i (2018) ketika bencana di Lombok (2018), Gempa Bantul (2006), dan badai siklon cempaka di Yogyakarta (2017). Strategi ini kadang bisa diklaim dan digunakan

partai dengan komitmennya melahirkan program populis pada saat kampanye karena sudah pernah terlibat. Kalangan yang memiliki tendensi politik cenderung memberikan kritikan bahwa aktivitas yang dilakukan PKS tujuannya mendekat pada masyarakat untuk memperoleh suara dalam proses elektoral. Garis ideologi Islam yang dimiliki PKS dalam situasi ini mendorong beberapa kandidat parpol melakukan kampanye dengan cara *soft* dengan misi solidaritas keumatan yang juga bagian dari visi kepedulian PKS. Distribusi kesejahteraan berwujud menjadi sosok dermawan melalui lembaga filantropi justru tidak kentara dimata masyarakat umum bahkan tidak banyak yang mengetahuinya.

Kondisi kerentanan yang terjadi di masyarakat adalah tidak bisa menilai secara obyektif kandidat yang datang dalam kegiatan kampanye karena keterbatasan pengetahuan dan akses berita yang *update* bahwa tindakan distribusi sembako juga bagian dari politik kesejahteraan atau politik filantropi. Khususnya ini terjadi di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan beberapa desa lainnya di Indonesia yang masih mengalami kesulitan akses informasi. Menjadi bentuk perhatian khusus untuk advokasi pendidikan politik yang merata. Keterbatasan informasi membuat penyakit masyarakat buta politik, dan hal ini menciderai makna demokrasi dimana harus transparan, akuntabel dan partisipatif. Keterbatasan akses yang dirasakan masyarakat di Indonesia menjadi celah permainan kandidat parpol untuk mendoktrin masyarakat awam dengan janji politik untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat seutuhnya. Sebenarnya inilah urgensi penyelenggara pemilu dalam fungsi pengawasan dan pencegahan untuk lebih memfokuskan diri pada masyarakat pedalaman sehingga makna demokrasi dapat berjalan seimbang dan merata di seluruh nusantara. Penyelenggara pemilu harus dapat memastikan bahwa

aktivitas filantropi yang dilakukan oleh beberapa kalangan tidak dalam makna *money politic* yang dapat memberikan kontribusi dalam proses elektoral.

2. Patronase Sebagai Sarana Konsolidasi Politik Filantropi

Bentuk-bentuk penguatan konsolidasi yang dilakukan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Cabang DIY yaitu melakukan ekspansi kemitraan kerja dengan beberapa lembaga organisasi berbasis keislaman yaitu Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK), Sekolah Islam Terpadu (IT), Madrasah Tsanawiyah (Mts), Dewan Masjid se- Indonesia (DMI). Hal ini secara jelas juga disampaikan oleh Munthori (2018) dalam wawancara sebagai berikut:

“Hampir di sekolah/kabupaten kota ada. Di DIY kita ada di Budi Mulya, Ushwatun Khasanah dengan sekolah IT (Islam Terpadu). Sekolah negeri, Mts (Madrasah Tsanawiyah)”.

Artinya aktivitas yang dilakukan oleh PKPU masih pada garis lurus gerakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggunakan kekuatan ideologis Islam dalam gerakan akar rumput (*grass root*) di lingkup pendidikan karena memang ruang gerak partai tidak bisa masuk dalam ranah sekolah dan perguruan tinggi atau universitas. Realitas hubungan kultural PKS dengan organisasi sayap partai segmen mahasiswa sangat erat seperti KAMMI sangat dekat satu sama lain. Maka jelas secara tidak langsung pelibatan KAMMI dalam aktivitas politik filantropi dapat memberikan keuntungan kedua belah pihak khususnya PKPU dan KAMMI menjadi mesin partai yang turut membantu merespon masyarakat dalam isu-isu kemanusiaan. Pembagian sistem kerjanya dimana KAMMI fokus mencari kader atau dakwah di lingkungan kampus segmen mahasiswa, sementara PKPU berada di

tengah masyarakat dengan merespon masalah kemanusiaan, artinya afiliasi politik kedua lembaga ini berada pada lingkaran PKS sebagai induk organisasi politik praktisnya. Hal ini senada diungkapkan oleh Dovi Perdana (2018) salah mantan politisi PKS Kota Yogyakarta tahun 2012 sampai 2014:

“Saya pernah di PKS sejak tahun 2012-2014, jujur saja di UGM ada partai Bunderan bukan rahasia umum lagi karena berafiliasi dengan PKS. Gerakan mahasiswa diarahakan pada kajian keislaman seperti pengajian. Saya beberapa kali ikut kajiannya, dakwah-dakwah kampus dan mayoritas teman saya fisipol UGM menjadi kader PKS. Teman saya menjadi pengerak rohis kajiannya di susupin kampanye PKS. Jadi memang partainya bunderan organisasinya KAMMI. Ralasinya sekuat hubungan Ibu dan anak. Jadi Ibunya PKS anaknya KAMMI. Selanjutnya anggota parlemen jika ada event melibatkan KAMMI, karena anggota parlemen juga orang-orang KAMMI”.

Misi gerakan dakwah dalam lingkup politik kampus ini menjadi sasaran strategis gerakan politik PKS dalam mendoktrin ideologi Islam (cuci otak) secara radikal. Mahasiswa yang krisis identitas diajarkan doktrin agama Islam dengan nuansa politik praktis. Teknisnya PKS mengawali dengan mengajarkan kaderisasi muda di lembaga dakwah kampus bagi mahasiswa muslim, selanjutnya kader muda itulah yang melakukan rekrutmen anggota lainnya, metode ini selalu berjalan dan selalu ada regenerasi berkelanjutan, contohnya di lingkungan kampus universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Aktivitas dakwah kampus mampu memberikan doktrin keislaman mahasiswa di lingkungan universitas. Organisasi pergerakan yang menjadi *background* partai Bunderan UGM adalah KAMMI. Kekuatan KAMMI dalam mengkonsolidasi misi dakwahnya juga dipengaruhi oleh sosok politisi **Fahri Hamzah** yang diyakini memberikan pengaruh besar dalam kiprah politik. Sosok Fahri Hamzah merupakan *founder* KAMMI dan pernah menjabat

sebagai ketua 1 pada tahun 1998-1999 serta turut serta melawan rezim orde baru. Sosok penokohan dalam sebuah organisasi selalu dijadikan patron untuk bagaimana estafet kepemimpinan muda juga mengikuti rekam jejaknya sebagai seorang politikus yang memberikan banyak pengaruh banyak orang, selanjutnya mampu menduduki jabatan dan memberikan pengaruh dalam sistem kebijakan pemerintah.

Kekuatan politik patronase memberikan pengaruh jangka panjang. Patronase merupakan konsep kekuasaan berada di puncak kekuasaan yang identik dengan basis pengikut (klien) atau kader. Kekuatan ini tidak mampu memutuskan rantai politik dalam setiap periodenya. Pengaruh tokoh utama selalu dijunjung tinggi sebagai patron walaupun sebenarnya tidak memberikan pengaruh besar dalam masa kepemimpinannya. Akan tetapi, dalam suatu lembaga atau organisasi hal ini selalu menjadi budaya atau batu loncatan untuk terus diregenerasikan demi mencapai posisi strategis dalam mendapatkan kekuasaan yang berada dalam kursi legislatif maupun eksekutif. Jabatan politik terkadang selalu membutuhkan seseorang untuk melakukan pencapaian dengan berbagai macam cara, sekalipun kadang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Begitulah perhelatan politik sebagai bagian dinamis yang selalu menuntut pemikiran pragmatis dan oportunistis yang sering keluar dari basis ideologi.

3. Konsep Kesejahteraan dalam Praktik Filantropi

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi terpenuhinya semua kebutuhan hidup masyarakat baik dari ketersediaan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan yang layak, maupun jaminan hak asasi manusia lainnya. Pada prinsipnya kesejahteraan dapat tercapai dengan adanya sebuah kebaikan dalam bentuk

pelayanan sosial-kemanusiaan. Dalam hal ini PKPU menyatakan sebagai lembaga kesejahteraan sosial berupaya membawa konsep filantropi yang sebelumnya hanya sebatas *charity* atau santunan menuju konsep filantropi modern berbasis pemberdayaan masyarakat khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peranan ini berupaya memberikan pelayanan kesejahteraan berkelanjutan (*sustainable*) sehingga dapat tercapainya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan adil. Masyarakat merupakan subyek pembangunan nasional yang berfungsi dalam mendorong misi perwujudan pengentasan kemiskinan untuk perubahan sosial. Kuntowijoyo (2018:126-127) menjelaskan sehubungan dengan demokrasi ada dua bentuk keadilan yaitu keadilan *distributive justice* dan *productive justice* yang keduanya menjadi dasar demokrasi sosial dan ekonomi. *Distributive justice* pelakunya yaitu negara dengan dasar demokrasi sosial, sedangkan *productive justice* pelakunya adalah perusahaan yang jelas menjadi dasar demokrasi ekonomi untuk memperoleh profit, maka hal tersebut juga yang mendorong banyak lahirnya lembaga filantropi selain bekerja dalam ranah sosial, juga memiliki prospek ekonomi dengan cara marketing filantropi secara masif dan aktif. Hal ini sejalan dengan pandangan Hilman Latief (2017:35) gerakan filantropi secara umum dipelopori oleh swasta baik perusahaan yang punya tanggungjawab sosial pada masyarakat dan ormas yang memiliki area sosial luas dalam praktik bermasyarakat.

Praktik gerakan filantropi saat ini bukan hanya saja dilakukan oleh negara tetapi, juga banyak pihak seperti swasta, *civil society*, media, partai politik, dan lembaga filantropi lainnya sehingga terjadi kontestasi politik filantropi dalam jaminan kesejahteraan masyarakat. Konsep kesejahteraan berbasis praktik filantropi seperti halnya lembaga PKPU cenderung ideologis dan oportunis.

Ideologis Islam dijadikan jembatan dalam membantu gerakan mitra kerja yang menjadi donor lembaga, dari kemudahan tersebut secara tidak langsung akan mendapatkan keuntungan jaringan kerja yang dapat membantu misi PKPU untuk eksis secara global. Gerakan yang dilakukan oleh PKPU bukan hanya memberikan jaminan perubahan sosial untuk keadilan tetapi, juga menjamin kesetaraan sosial dan ekonomi melalui aktivitas pemberdayaan masyarakat.

1.2.3 Filantropi Islam dan Demokrasi

Filantropi modern merupakan bentuk transformasi filantropi Islam (zakat, wakaf, dan Infaq) yang memiliki kekuatan finansial besar dalam mendukung proses pembangunan kesejahteraan masyarakat sebuah negara. Indonesia khususnya pada era Orde Baru rezim Soeharto pernah menggunakan dana zakat selama kurang lebih 2 tahun (1968-1970) dengan tarif pertahun minimal 2,5 milyar, wajib zakat untuk negara tersebut layaknya seperti tarif pajak untuk negara dan berhentinya zakat nasional ini disebabkan tidak adanya dukungan dari kalangan mayoritas muslim. Sehingga ketika adanya kebijakan pemerintah tentang pelembagaan filantropi Islam baik berbasis negara (BAZNAS, LAZNAS) maupun masyarakat sipil seperti halnya berdirinya (PKPU, Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, dll) hal ini disambut dengan kegembiraan kaum reformis yang bercita-cita ingin memperbarui filantropi Islam dari praktik tradisionalnya (pajak negara) menuju manajemen lembaga khusus zakat.

Tak terkecuali PKPU sebagai lembaga filantropi yang lahir dari aktivitas amal saleh kader PKS dan adanya kecendrungan masa lalu aliansi PKS berhasil melengserkan rezim Orde Baru (Soeharto) melalui organisasi gerakan mahasiswa

KAMMI, maka tidak menutup kemungkinan ketika lembaga filantropi PKPU berbasis Islam taraf Internasional ini juga dijadikan alat politik yang memiliki agenda untuk membantu mendirikan negara Islam di Indonesia dengan membangun afiliasi politik Islam untuk mengukudeta rezim penguasa saat ini. Dinamika politik selalu memperlihatkan fakta unik dalam setiap waktu khususnya bagi kelompok reformis semakin tersedianya ruang dalam mengisi kekosongan negara sebagai upaya membantu pelayanan filantropi modern untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Kini menunjukkan semakin membuka keyakinan kelompok reformis (*Civil Islam*) akan berdiaspora mengislamisasi semua sektor kehidupan salah satunya melalui aktivitas pemberdayaan filantropi dimana PKPU juga memiliki agenda mengislamisasi masyarakat. Terbukti dalam beberapa keterangan informan penelitian yang berasal dari pengurus PKPU cabang Daerah Istimewa Yogyakarta Agus Triyono selaku bidang pendayagunaan mengakui adanya beberapa kelompok masyarakat di desa binaan sebelumnya non muslim menjadi muslim. Hal tersebut membuktikan adanya strategi khusus metode dakwah dan advokasi (*advocacy*) PKPU dalam melakukan kerja-kerja sosial sebagai lembaga kesejahteraan dan kemanusiaan membawa misi dakwah politik Islam terselubung dalam memperluas basis masa.

Filantropi sangat erat korelasinya dengan demokrasi yang selalu membuka sebuah partisipasi publik ditandai dengan hadirnya eksistensi masyarakat sipil Islam sebagai lembaga independen non negara menjadi aktor penyeimbang (*actor intermediary*) antara rakyat dan negara dalam mendukung agenda pembangunan nasional khususnya dalam mewujudkan cita-cita konstitusi yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia merupakan salah satu contoh bentuk

negara demokrasi yang sangat membuka kebebasan masyarakat sipil dalam berpartisipasi membantu visi nasional khususnya lahirnya banyak gerakan sosial masyarakat sipil (*civil society*) sebagai sektor ketiga yang mengisi kekosongan disaat negara gagal dalam menyediakan jaminan kesejahteraan masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan dan teknologi. Maka peranan masyarakat sipil inilah yang akan selalu sigap, cepat, dan tepat dalam membantu distribusi pelayanan kesejahteraan masyarakat. Sejarah orde baru memperlihatkan kalangan reformis sebagai kelompok yang memiliki agenda mengislamisasi negara, maka di era kontemporer agenda yang di adopsi dari kalangan reformis ditransformasikan dalam aktivitas sosial (Filantropi) dilakukan oleh beberapa lembaga baik, lembaga filantropi, partai politik (PKS), media, CSR, dan beberapa lembaga lainnya, juga mulai menunjukkan komitmen sosial melalui aktivitas filantropi kesejahteraan baik berbasis pemberdayaan maupun *Charity* (sumbangan). Munculnya banyaknya lembaga filantropi menandakan ruang demokrasi yang sangat terbuka, bahkan terjadi adanya kontestasi penyedia kesejahteraan baik dari lembaga Filantropi, partai politik, CSR, dan beberapa lembaga lainnya. Maka disini peran negara mulai berkurang dan diisi oleh beberapa sektor di atas yang berkomitmen dalam distribusi pelayanan kesejahteraan sebagai organisasi non profit.

1.2.4 Aksi Filantropi Ormas Islam (Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)

Kompleksitas permasalahan sosial yang ada di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh tanggungjawab pemerintah secara keseluruhan, melainkan ada dua peran besar dari organisasi masyarakat yang besar di Indonesia yaitu

Muhammadiyah terkenal dengan sebutan masyarakat Islam berkemajuan dan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Islam Nusantara. Dalam artian Islam Nusantara yang berkemajuan tersebut pada dasarnya sama-sama memiliki kontribusi bagi Indonesia, pasalnya Muhammadiyah dan NU besar dan berkembang dengan gerakan jihad dimana salah satunya memiliki komitmen dalam masalah kemanusiaan atau filantropi. Kedua ormas ini dapat dikatakan sebagai penyangga Republik ini khususnya dalam jaminan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat melalui beberapa lembaga baik pelayanan pendidikan sampai tanggap bencana masih intensif dalam mengisi ruang kosong negara.

Dalam penelitian Azca, Salim, Arrobi, Asyari, dan Usman (2019) tentang peran kontribusi Muhammadiyah dan NU dalam perdamaian dan demokrasi dihasilkan beberapa poin yang pertama terkait filantropi Muhammadiyah yang berkembang dan subur di Indonesia baik secara kultural maupun struktural Muhammadiyah telah menasar tidak hanya masalah bencana alam namun juga merambah pada bencana sosial seperti daerah konflik, perang dan krisis kemanusiaan. Selain itu aktivitas filantropinya telah mencapai di luar wilayah kedaulatan Indonesia yang notabene bukan wilayah persyarikatan. Aktivitas filantropi dalam Muhammadiyah dilakukan oleh tiga aktor yaitu MDMC, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), dan Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). Sementara aktivitas filantropi NU dilakukan oleh NU-Peduli, LAZISNU (Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama), dan LPBI NU (Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama). Aktivitas yang dilakukan filantropi NU juga tidak jauh dari filantropi

Muhammadiyah mulai dari fase mitigasi atau tindakan preventif, *emergency*, dan pasca bencana (rehabitasi).

Kedua ormas Islam tersebut memiliki sumbangsih besar bagi jaminan pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia, bisa dilihat jumlah lembaga pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan intensif sejak beberapa abad yang lalu. Kedua ormas ini memiliki komitmen berkhidmat dalam gerakan sosial-kemanusiaan. Isu kemiskinan ditanggapi dengan gerakan pemberdayaan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi mikro. Gerakan dakwah nusantara yang berkemajuan ditransformasikan dengan arah merespon masalah pada tataran akar rumput khususnya kemiskinan, angka putus sekolah, dan buruknya kualitas pelayanan kesejahatan. Kedua Ormas Islam ini berupaya menjadi garda terdepat perubahan sosial dengan menjadi sektor kedua atau swasta yang juga tujuannya dari pengembangan unit bersifat profit sehingga dapat menompang kegiatan operasional lembaga atau dapat dikatakan sebagai badan usaha milik ormas, dalam Muhammadiyah disebut dengan amal usaha.

Perbedaan antara filantropi ormas (Muhammadiyah dan NU) dengan lembaga filantropi lain misalnya PKPU, Aksi Cepat Tanggap (ACT), Rumah Zakat, Rumah Yatim, Dompot Dhuafa, dan beberapa lembaga lainnya terletak pada jamaahnya (*follower*) karena ormas memiliki tujuan dakwah Islam sehingga dalam arah gerakannya cara dan pendekatannya adalah dengan aktivitas pemberdayaan dan filantropi Islam baik berupa zakat, infaq, dan shadaqah, namun seiring banyaknya permasalahan filantropi Islam bergeser kedalam filantropi modern untuk perubahan sosial jangka panjang yang dilakukan dengan motode

pemberdayaan masyarakat. Kemenangan Ormas Islam memiliki basis masa atau jamaah sesuai dengan pilihan masyarakat maka dalam hal ini membuat lembaga filantropi ormas memiliki peluang besar dalam segi pemasukan donasi yang diperoleh dari basis jamaahnya memiliki kemudahan karena ada hubungan kultural yang terbina dari struktur organisasi Induk (Muhammadiyah atau NU).

Sementara kedudukan lembaga filantropi non ormas seperti yang tersebut di atas meskipun notabene murni dari gerakan *civil society* atau *Civil Islam* belum memiliki jamaah yang kuat seperti halnya jamaah Muhammadiyah dan NU. Hubungan kedekatan kultural jamaah kepada organisasi induk membuat kecenderungan khusus masyarakat untuk melakukan donasi atau zakatnya. Seperti halnya PKPU sangat intensif dengan melakukan marketing filantropi yang menysasar organisasi atau lembaga berbasis Islam. Menjadi faktor khusus untuk PKPU sebagai salah satu lembaga filantropi yang lahir atas inisiator elit parpol PKS maka gerakan yang dilakukan cenderung gerakan politik ideologi Islam yang mendukung arah perkembangan PKS. PKPU masih berada dalam satu garis pada gerakan parpol yang memanfaatkan relasi dan jaringan PKS.

Berbeda dengan Dompot Dhuafa, Aksi Cepat Tanggap (ACT), DD dan lainnya yang murni sebagai lembaga filantropi berbasis masyarakat sipil belum diketahui kemana arah patron-patron politiknya sehingga mereka mendapat donatur besar dalam mendukung kegiatan operasional untuk pelayanan kesejahteraan sosial. Apakah lembaga berbasis Islam ini juga masih berada dalam *background* filantropi Islam Muhammadiyah dan NU, apakah lembaga tersebut masuk dalam aliansi parpol atau berada dalam gerakan Islam lainnya. Dalam hal ini penulis belum mendapat bukti empirik yang dapat mendukung patron gerakan politik

lembaga filantropi tersebut. Posisi netral lembaga filantropi secara kelembagaan, berbeda secara kultural karena banyak yang mendukung kinerja lembaga secara internal dan berusaha menjadi donatur demi kelangsungan dan eksistensi lembaga filantropi. Kekuatan lembaga filantropi berbasis Islam atau berbasis masyarakat sipil masih belum terlihat jelas kedekatannya dengan kedua ormas (Muhammadiyah dan NU).

1.2.5 Pengetahuan Kesejahteraan untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Hadir ditengah-tengah krisis multidimensi membuat pegiat filantropi PKPU sangat cermat dalam memetakan masalah sosial dan mampu memberikan aksi nyata strategis untuk kegiatan sosial-kemanusiaan. Kuatnya empati dan tanggungjawab sosial para pegiat filantropi pada masa itu dilatarbelakangi oleh hasil analisa atau pengetahuan tentang ketimpangan semakin kompleks. Kekuatan pengetahuan bahwa masyarakat belum sejahtera alias mengalami banyak permasalahan sosial, membuat pegiat filantropi PKPU semakin kuat dalam memikirkan inovasi program. Terlihat jelas perjalanan PKPU yang awalnya hanya aktivitas *charity* atau santunan menjadi program yang lebih populis berbasis pemberdayaan dan advokasi. Pemberdayaan yang dilakukan PKPU mengedepankan klaster berdaya fokus pada pengembangan potensi SDM dan modal sosial masyarakat dengan menggunakan konsep 3 pilar utama yaitu, kader berdaya, keluarga berdaya dan kampung berdaya. Poin penting dalam aktivitas pemberdayaan keluarga berdaya terdapat tujuan yaitu salah satunya fokus pada peningkatan perekonomian keluarga yang dilakukan dengan cara membentuk beberapa unit usaha untuk dikelola setiap keluarga yang disebut Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat (KUMM). Selain itu kampung

berdaya juga memiliki tujuan pemberdayaan ekonomi lokal yaitu BID (Bangun Industri Desa) merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pembangunan sarana ekonomi berbasis potensi lokal.

Sejalan dengan konsep dan agenda program yang ada ditingkat pusat, PKPU cabang DIY sudah menjalankan agenda program pemberdayaan ekonomi lokal dalam beberapa tahun seperti di Desa binaan yang berada di Gunung Kidul, PKPU menjalankan usaha peternakan Kambing, dan menginisiasi kegiatan ekonomi mikro (makanan lokal) yang modalnya berasal dari hasil peternakan. Pegiat PKPU percaya kekuatan klaster berdaya dapat membangun beberapa sektor pendamping di luar agenda pokok program. Gerakan yang dilakukan oleh PKPU selalu membawa iklim produktif masyarakat untuk tetap berdaya dan mandiri sesuai dengan potensi wilayah. Arah pembangunan yang dilakukan oleh PKPU tidak saja menasar pada kegiatan sosial, tetapi juga pemberdayaan ekonomi. Artinya dalam hal ini PKPU sebagai lembaga filantropi mampu menjadi alat pembangunan nasional berbasis pemberdayaan masyarakat.

Kinerja yang dilakukan PKPU dengan optimalisasi pemberdayaan ekonomi juga merupakan bagian dari misi kesejahteraan, sehingga dapat dibangun dengan beberapa upaya salah satunya memanfaatkan peluang sumberdaya. Tujuan dari pembentukan klaster berdaya yaitu menghasilkan kader mandiri dan proaktif dalam mendukung agenda program PKPU. Berikut adalah data sebaran program pemberdayaan ekonomi se- DIY yang dilakukan oleh PKPU berdasarkan potensi wilayah. Table 2.3 Sebaran Program pemberdayaan Ekonomi PKPU Cabang DIY:

No	Program Pemberdayaan Ekonomi	Kab/Kota
1	Peternakan Kambing	Gunungkidul
2	Makanan olahan	Kulon Progo, Sleman, Gunungkidul
3	Kerajinan eceng gondok, Kerajinan	Bantul

Sumber: Diolah penulis (2019)

Kekuatan pemberdayaan ekonomi lokal jika dikembangkan merupakan alat kekuatan ekonomi politik yang akan berjalan menguasai pasar. Sehingga optimalisasi kearifan lokal dengan metode ekonomi kerakyatan diharapkan mampu memberikan suntikan positif untuk masyarakat pada tataran akar rumput yang belum merasakan kesejahteraan. Dalam hal ini PKPU menuju pada arah pembangunan berdasarkan SDGs meskipun belum diketahui secara empirik motif kerja-kerja sosial dalam ranah politik praktisnya. Arah gerakan pemberdayaan PKPU diharapkan mampu menjadi sektor ketiga yang dapat membantu negara, bukan menjadi musuh negara yang memiliki maksud terselubung dibalik aktivitas sosialnya. Selain aktivitas ekonomi mikro berbasis kearifan lokal PKPU berupaya mengoptimalkan sumberdaya potensial lainnya, termasuk kontribusi kelompok wanita dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Berikut korelasi antara filantropi dan gender sebagai bentuk representasi kontribusi kekuatan dan dedikasi perempuan dalam pembangunan nasional.

1. Filantropi dan Gender

Aktivitas filantropi modern yang berbasis pemberdayaan seringkali melibatkan peranan perempuan di dalamnya, seperti kelompok PKK, dasawisma, atau organisasi kelompok tani wanita yang banyak terdapat dalam masyarakat pedesaan. Seperti halnya dilakukan PKPU selama ini menyatukan konsep filantropi dan gender dalam agenda pembangunannya yaitu Rumah Srikandi yang

saat ini menjadi Bunda Mengajar merupakan output pemberdayaan kampung berdaya yang turut diikutsertakan dalam program nasional. Keberhasilan kader berdaya atas aktor perempuan menunjukkan bahwa PKPU juga mengarusutamakan kesetaraan dan mengembangkan potensi kerja perempuan. PKPU melihat program Rumah Srikandi menjadi agensi untuk mengubah wilayah sasaran menuju hidup sehat dengan dukungan dan sentuhan tangan perempuan.

Filantropi gender merupakan kekuatan tersendiri menggunakan potensi kerja sosial yang dilakukan oleh perempuan. Asas egaliter dan emansipatif terlihat jelas dalam gerakan sosial yang berhasil dalam agenda programnya. PKPU selalu cermat dalam memanfaatkan potensi SDM yang ada di wilayah binaannya. Hal ini sesungguhnya menjadi barometer lembaga filantropi lainnya harus melihat bahwa sumberdaya yang dimiliki perempuan mampu menjadi garda pembangunan nasional dalam berbagai bidang, baik aspek sosial, kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi politik. Hal ini dapat mengubah persepsi bahwa wilayah kerja perempuan bukan hanya pada ranah privat sumur, kasur, dan dapur tapi lebih dari itu. Kekuatan perempuan mampu mendorong, mengubah, bahkan merawat dalam jangka panjang yang memberikan output secara luas.

1.3 TATA KELOLA GERAKAN FILANTROPI

Tata kelola gerakan filantropi merupakan sistem yang akan mempermudah kinerja lembaga filantropi karena di dalamnya didukung oleh beberapa unsur yaitu adanya syarat gerakan filantropi untuk perubahan sosial, filantropi sebagai pilar pembangunan, tata kelola lembaga filantropi, gaya marketing politik filantropi, dan adanya transformasi ideologi. Berikut ini penjelasan secara lengkapnya:

1.3.1 Syarat Gerakan Filantropi untuk Perubahan Sosial

Semua praktik gerakan filantropi bertujuan untuk melakukan kebaikan dan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Gerakan tersebut harus didukung sebuah indikator yang dapat dijadikan syarat khusus pelaksanaan secara teknis. Hilman Latief (2017: 40) menjelaskan sebuah gerakan filantropi memiliki beberapa prasyarat yang dibutuhkan dalam rangka memberikan dampak terciptanya perubahan sosial yaitu modal sumber daya manusia (*human capital*), modal finansial (*financial capital*), modal spiritual (*spiritual capital*), dan modal sosial (*social capital*), serta ideologi.

Dari beberapa syarat di atas akan dibahas lebih lanjut terkait modal sosial yang mendukung tercapainya kesejahteraan dan keadilan untuk mewujudkan tatanan perubahan sosial masyarakat. Modal sosial harus dilandasi oleh kepercayaan sosial, jaringan sosial, kerelawanan (*voluntary*), dan partisipasi masyarakat. Dukungan modal sosial tersebut yang selama ini menjadi misi strategis PKPU, dimana dalam praktik model *pilot projectnya* mampu menarik antusiasme dan simpatik masyarakat untuk turut serta mendukung kesuksesan program kerja. Dengan adanya antusiasme tersebut akan muncul partisipasi kolektif yang aktif dan inovatif dalam membantu kesuksesan agenda kesejahteraan khususnya dalam program kerja sosial-kemanusiaan.

1.3.2 Filantropi sebagai Pilar Pembangunan Global

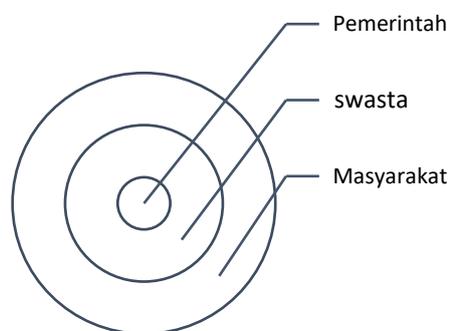
Praktik gerakan filantropi mulai dari aktivitas jangka pendek seperti aktivitas filantropi Islam (zakat, infaq, wakaf) sampai bertransformasi menjadi filantropi modern atau keadilan sosial menyimpan banyak manfaat yang sangat

mempengaruhi proses pembangunan kesejahteraan nasional. Tradisi filantropi mampu menjadi pilar ketiga dalam pembangunan berkelanjutan. Pernyataan *The Organization of Economic Cooperation for Development* dalam Tamim (2016) menyatakan gagasan filantropi sebagai pilar pembangunan karena untuk menginisiasi pentingnya kontribusi perusahaan dalam mendukung program berkelanjutan sebagai upaya dalam merespon isu perubahan iklim dan pemanasan global. Upaya tersebut sebenarnya jika dicermati dalam kehidupan bermasyarakat sudah dipraktikkan dengan cara gotong royong, dan saling tolong menolong untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Praktik filantropi atau istilah umumnya kedermawanan saat ini menjadi suatu aktivitas sosial yang banyak dilakukan oleh beberapa orang baik bersifat individu maupun secara kolektif atau kelembagaan. Filantropi memberikan penekanan khusus dalam pembangunan kesejahteraan jangka panjang. Menurut *American Heritage Dictionary* dalam Tamim (2016), definisi filantropi mencakup tiga makna; 1) upaya peningkatan taraf hidup manusia, 2) rasa mencintai manusia secara universal dan 3) praktik dan aktivitas yang diarahkan untuk mempromosikan kesejahteraan manusia. Dalam hal pembangunan nasional akan dikaji lebih mendalam bagaimana praktik marketing kesejahteraan berbasis filantropi tersebut berjalan. Hal ini sangat dibuktikan oleh perjalanan panjang kiprah PKPU hadir ditengah-tengah krisis multidimensi yang berhasil mengisi ruang kosong negara. Perjalanan PKPU awalnya hanya sebuah yayasan berkembang menjadi lembaga kesejahteraan berstandar internasional di bawah PBB, maka hal ini tentu akan memudahkan sinergitas agenda program dengan arah pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGS). Pada praktiknya

metode kerja yang dilakukan oleh PKPU dibuat pembagian *teamwork* seperti tim kemitraan, tim pendayagunaan, dan tim operasional. Marketing dijalankan oleh bidang kemitraan untuk memudahkan pemasaran dan mencari mitra kerja lembaga.

Korelasi filantropi dan pembangunan tidak lepas karena adanya sumbangan besar dari anggaran filantropi. Menurut Robert Putnam dan James O Midgley dalam Tamim (2016) keduanya meletakkan faktor modal sosial sebagai pilar pembangunan. Midgley memetakan peranan ketiga aktor antara pemerintah, swasta dan, masyarakat harus bersinergi. Pemerintah berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sebagai lembaga negara yang harus memberikan jaminan kesejahteraan rakyat dengan kebijakan sosial yang humanis dan emansipatif, sementara swasta sebagai penyedia lowongan kerja dari aktivitas kerjanya, sehingga memberikan peluang pengurangan jumlah pengangguran. Sedangkan masyarakat sebagai aktor mandiri mempunyai modal sosial untuk pengentasan kemiskinan. Adapun model sosial yang dimaksud adalah hasil aktivitas filantropi (aksi kedermawanan) juga memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi baik skala lokal maupun nasional. Dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:



Sumber: Midgley dalam Tamim (2016)

Selain dari ketiga aspek tersebut yang menjadi pilar pembangunan penekanan utamanya yaitu bagaimana marketing dalam pelayanan jaminan kesejahteraan berjalan baik dari mulai penyedia layanan pendidikan, kesehatan, sampai aktivitas pemberdayaan sosial untuk peningkatan ekonomi mikro masyarakat. Aktivitas filantropi merupakan sebuah program yang inovatif ketika sudah terjalin sinergitas yang baik dalam agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN dan agenda pembangunan secara global melalui SDGs (*Sustainable Development Goals*). Pada prinsipnya agenda program pembangunan kesejahteraan yang dilakukan oleh PKPU cabang DIY secara tidak langsung selaras dengan agenda SDGs, hal ini bisa dilihat dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Memerangi angka kemiskinan yang terjadi di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada prosesnya PKPU sudah berupaya dengan beberapa cara yaitu optimalisasi potensi kearifan lokal seperti produksi makanan, dan kerajinan.
2. Memastikan pendidikan dan mendukung kesempatan belajar, PKPU cabang DIY khususnya sangat apresiatif dalam mendukung agenda program pendidikan yang dibuktikan dengan beasiswa pintar yang diserahkan kepada beberapa sekolah atau peserta didik langsung yang menjadi obyek sasaran.
3. Mencapai kesetaraan gender dalam hal ini PKPU cabang DIY sudah membuktikan dengan keberhasilan rumah Srikandi yang berubah nama menjadi Bunda Mengajar di Kota Yogyakarta, dalam program ini

kontribusi peranan perempuan sangat bagus untuk membantu percontohan agenda pembangunan kesejahteraan sosial berbasis gender.

4. Memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi semua, hal ini telah menjadi program pembangunan PKPU di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo dengan mengadakan pembangunan sumur bor untuk mendapatkan air bersih. Selain itu ada program sanitasi dengan program rekor muri seribu jamban.
5. Mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka salah satunya melalui cara optimalisasi kearifan lokal baik kerajinan dengan metode pendampingan sehingga masyarakat dapat melanjutkan usaha mikro home industri.
6. Memastikan hidup sehat dan kesejahteraan sosial maka dalam hal ini PKPU melalui program pemberdayaan maupun *charity* yang sifatnya hanya jangka pendek telah mengupayakan jaminan kesejahteraan sosial.

1.3.3 Tata Kelola Lambaga Filantropi

Sebagai lembaga yang melakukan interaksi dengan banyak kalangan sudah sewajarnya lembaga filantropi memiliki beberapa tata kelola lembaga untuk menjamin kredibilitas pelayanan kesejahteraan, diantaranya sebagai berikut:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kemampuan terpenting untuk pertanggungjawaban sosial lembaga kepada mitra kerja dan donor dalam melaksanakan agenda program pembangunan kesejahteraan berbasis pemberdayaan. Akuntabilitas PKPU selama ini cukup baik dimana terbukti dengan kemampuan kinerjanya memberikan prestasi awalnya hanya sebuah

yayasan, mampu berubah menjadi lembaga filantropi nasional bertaraf internasional. Akuntabilitas tersebut dibuktikan dengan realisasi program yang sangat baik sehingga masyarakat menaruh kepercayaan lebih untuk mendonorkan hartanya di lembaga PKPU. Selain itu PKPU secara tegas menyatakan sikap sebagai lembaga sosial yang tidak lagi mengurus perihal zakat.

b. Transparansi

Kemampuan akuntabilitas yang cukup baik tersebut sebenarnya belum dapat dikatakan baik ketika tidak didasari oleh adanya transparansi. Transparansi ataupun keterbukaan PKPU masih belum maksimal karena PKPU tidak berani menjelaskan kronologi sejarah terbentuknya PKPU secara detail, jasa-jasa aktivis muslim itulah sebagai pelopor utama yang disisi lain menjadi kader potensial PK (saat ini PKS). Namun, PKPU tidak berani menyatakan kebenaran secara terbuka dimata publik bahwa lahirnya atas bantuan aktivitas kader muslim sekaligus menjadi elit partai politik PKS dalam misi kepedulian umat.

c. Netralitas dan Independensi

Sisi historis sebagai lembaga yang dilahirkan oleh jasa kader atau elit PKS, hal ini jelas menegaskan bahwa PKPU tidak netral dan tidak independen. Meskipun secara kelembagaan PKPU berusaha menjaga netralitas dan profesionalitas lembaga namun, secara kultur ideologis PKPU berada dalam garis sejajar menggunakan jaringan (*networking*) PKS dalam mengkonsolidasikan kekuatan Islam khususnya. Hal ini dapat dilihat melalui upaya kemitraan dengan basis Islam, dan afiliasi segmen mahasiswa yaitu KAMMI dan Tarbiyah.

Selain ketiga aspek di atas untuk menjamin kualitas pelayanan kesejahteraan lembaga filantropi memiliki dasar motivasi yang dilakukan dalam menjalankan aktivitas kerja-kerja sosialnya disebut dengan motivasi politik filantropi merupakan aktivitas kemanusiaan yang dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun kedua hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam yang bersumber pada ideologi lembaga. Ideologi merupakan keyakinan dari agama yang mendasari aktivitas kerja kemanusiaan. Faktor internal yang dilakukan PKPU berasaskan Islam. Artinya lembaga PKPU menjalankan berdasarkan konsep aqidah yang sejatinya merupakan asal mula lahirnya konsep filantropi Islam atau teologi Al-Maun. Seiring tuntutan perkembangan zaman konsep filantropi dijadikan sebuah istilah yang mulai umum ada di masyarakat dalam memberikan bantuan (*charity*) berupa zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, dalam kegiatan ini disebut juga filantropi tradisional karena sifatnya jangka pendek. Hal ini sejalan dengan Chusnan Yusuf yang dikutip Waskito Wibowo (2018) dalam penelitiannya menjelaskan para sarjana membagi filantropi menjadi dua macam yaitu filantropi tradisional dan filantropi modern (berkeadilan). Artinya filantropi tradisional bersumber dari perintah ajaran agama Islam yang sifatnya hanya sementara dalam bentuk bantuan (*charity*) baik barang maupun uang yang dibatasi oleh waktu tertentu atau periode khusus misalnya bulan ramadhan wajib zakat untuk umat Islam sesuai ketentuan agama bukan kewajiban zakat pada

negara. Selain itu juga penerimanya manfaat (Mustahik) sudah ada aturan sesuai dengan syariat Islam.

Dasar keislaman itulah juga menjadi unsur utama dalam membantu arah kerja kemanusiaan PKPU, misi yang dibawa bukan hanya merespon masalah sosial, melainkan mewujudkan gerakan dakwah secara global PKPU karena sejarahnya dilahirkan oleh aktivis muslim yang sempat belajar di Timur Tengah. Gerakan dakwah PKPU juga merespon isu kristenisasi yang ada di Indonesia. PKPU memiliki strategi khusus dalam melakukan pendekatan untuk memberikan pelayanan kesejahteraan kepada kelompok masyarakat yang berbeda agama melalui distribusi kesejahteraan dengan cara membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, hal ini sering membuat beberapa orang akhirnya tertarik masuk Islam. Sementara model filantropi modern (keadilan sosial) menjadi hal moderat yang lebih melihat dalam makna luas untuk merespon isu kemanusiaan dan sosial dalam memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan untuk perubahan sosial.

Model konsep filantropi Islam (tradisional) PKPU masih tetap menjadi dasar penguat kegiatan filantropi keadilan sosial (modern) yang menasar pada kegiatan kesejahteraan harus mangarusutamakan Islam sebagai dasar gerakan dakwah *amar ma'aruf nahi mungkar*. Menurut Hilman Latief (2013) tragedi distribusi zakat menggambarkan kompleksitas aktivisme kedermawanan pada masyarakat akar rumput dan menunjukkan bagaimana konsep kedermawanan dan kesejahteraan dipahami dengan cara pandang yang berbeda-beda. Dia juga menambahkan kedermawanan menandai gerakan filantropi yang lebih

teroganisir dari bentuk aktivitas yang karitas yang terbatas sampai bentuk kegiatan transformatif. Dalam hal ini PKPU sudah dapat memahami sistem pembagian arah kerja antara pemberdayaan dan karitas (*charity*) yang sangat berbeda teknisnya di lapangan. Pemberdayaan dilakukan dengan metode perencanaan yang panjang, untuk memaksimalkan potensi dalam membantu permasalahan kelompok sasaran, sementara *charity* hanya program bantuan yang sifatnya jangka pendek atau sementara. Hal ini juga di ungkapkan oleh Munthori (2018) pada saat wawancara sebagai berikut:

“Kemudian aktivitas PKPU kebanyakan di Kabupaten Kulon Progo hanya charity (baksos) di daerah pedalaman dan hanya datang seperti memberi santunan sembako, santunan anak yatim dan pelayanan kesehatan untuk wilayah minus”

Pada prinsip kerjanya PKPU Cabang DIY yang menaungi 5 Kabupaten/ Kota DIY sudah dapat memetakan program kerja berdasarkan potensi dan wilayah sasaran yang dijadikan desa binaan. Selain itu PKPU menjadi lembaga yang selalu menggunakan standart Internasional sudah tidak menerima bantuan dalam bentuk barang melainkan hanya dalam bentuk uang (*financial*). PKPU berupaya membangun dan menghidupkan ekonomi kerakyatan di wilayah yang mengalami bencana melalui proses pembelian sumber logistik berasal dari pedagang lokal yang masih menyediakan barang kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. PKPU sangat percaya kegiatan ini selain bisa menghemat anggaran transportasi juga sangat berfungsi untuk menyelamatkan ekonomi kerakyatan pasca bencana terjadi, seperti ungkapan Abdul Rais Kaharuddin dalam wawancara sebagai berikut:

“PKPU pakek standar Internasional namanya SPEAR. Makanya kalau di Jogja kita tidak menerima donasi berupa barang sekarang tidak boleh. Karena ternyata saat kita membawa barang masih ada toko klontong yang masih buka disana. Jadi PKPU ingin uang saja. Kita beli logistik disana. Karena hal ini pertama bisa menghidupkan ekonomi masyarakat yang baru jatuh kedua, karena biaya transportasi logistik yang mahal. Itu yang membuat pertimbangan PKPU banyak hal dan memang distandar Internasional tidak boleh. Kalau masih ada lembaga sosial yang masih terima barang artinya dia belum menggunakan standar Internasional. Karena jangan sampe kita membawa banyak barang dan disana tidak laku, akhirnya ekonominya mati. Itulah cara PKPU menghidupkan ekonomi rakyat (Ungkap Kaharudin, 2018).

2. Faktor Eksternal (Sekuler)

Faktor eksternal merupakan faktor yang dipengaruhi oleh konsep sekularisme. Artinya sebuah lembaga atau institusi negara harus memisahkan diri dari agama ataupun kepercayaan. Maka konsep filantropi modern (keadilan) merupakan suatu dasar motivasi eksternal yang harus dipahami bersama. Lahirnya konsep ini bisa dikatakan sebagai upaya keseimbangan dalam rangka distribusi kesejahteraan. Filantropi keadilan sosial mengacu pada praktik berderma yang dilakukan secara terorganisir untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi pada masyarakat, sehingga melahirkan sifat program strategis dan berdimensi jangka panjang (Wibowo, 2018). Maka sudah seharusnya dasar sekularisme tersebut tidak berlaku untuk PKPU sebagai lembaga kemanusiaan atau *Non Government Organization (NGO)* dan masyarakat sipil lainnya yang memiliki misi dalam distribusi kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa melihat latar belakang agama, suku maupun adat istiadatnya untuk perubahan sosial. Secara kelembagaan PKPU berbasis Islam dan secara kinerja

harus mampu memberikan pelayanan kepada semua pihak maka jelas PKPU bukan lembaga sekuler yang harus memisahkan antara kepentingan negara (sosial) dan agama. Meskipun representasi dari Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan sebuah negara sekuler yang mengakui agama, tetapi tidak menjadikan salah satu agama nasional dalam ideologi negara secara resmi. Islam tetap menjadi faktor signifikan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim (Fauzia: 2013).

Hal ini dibuktikan PKPU pada saat penanganan bencana gempa bumi di Lombok, Palu dan beberapa bencana lainnya yang pernah terjadi dalam lingkup nasional maupun internasional. Tim relawan bekerja di lapangan dalam upaya pencarian korban tanpa memandang identitas tersebut. Justru kegiatan ini dipandang sebagai gerakan dakwah yang bisa merangkul semua kalangan atau Islam yang *Rahmatan Lil Alamin*. Sekularisme seringkali menjadi sebuah isu nasional yang seringkali viral di media. Indonesia bukan negara sekuler seperti Amerika Serikat. Di Indonesia agama dan negara bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Sejatinya Indonesia merupakan negara dengan ideologi Pancasila yang secara konstitusi mengakui keberagaman agama. Masyarakat penganut agama apapun diperlakukan sama dan negara selalu menjamin hak-hak warga negara dalam hidup berbangsa dan bernegara. Fakta tersebut sudah tertuang dalam konstitusi dan menjadi kesepakatan bersama yang bersifat resmi demi tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menuju persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial itulah asal mula munculnya lembaga PKPU, *Civil Society* (masyarakat sipil muslim), LSM, dan beberapa lembaga

keagamaannya lainnya muncul dalam melakukan kerja kemanusiaan (Filantropi) dan sosial. Mereka bekerja untuk membantu negara ketika negara gagal dalam memberikan jaminan distribusi kesejahteraan. Peran PKPU membantu mengisi kekosongan negara dalam memberikan kesejahteraan, dan tidak bisa dipungkiri arah kerjanya sudah pada ranah internasional membantu negara-negara lain dalam masalah kemanusiaan baik korban konflik, bencana alam maupun kemiskinan. Selain itu juga kemitraan yang dilakukan PKPU mampu mengandeng organisasi sosial dari Timur Tengah seperti UEA AID yang sekaligus sebagai donatur internasional.

Filantropi modern yang dijalankan PKPU lebih sering berbasis pemberdayaan (*empowerment*) yaitu kegiatan dilakukan mengedapankan 3 program utama yaitu *inisiatif for children, inisiatif for disaster, dan inisiatif empowerment*. Pemberdayaan prinsipnya merupakan dasar-dasar dalam metode pembangunan yang sejalan dengan agenda SDGs. Menurut teori *Merriam Webster dan Oxford English Dictionary* yang dikutip Wibowo (2018) membagi pemberdayaan dalam dua pengertian, yaitu *to give power or to authority*, dan pengertian *to give ability or to enable*. Pengertian pertama diartikan memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan pengertian kedua upaya memberikan kemampuan. Peranan PKPU adalah sebagai sebuah lembaga fasilitator yang memberikan kemampuan dengan beberapa metode baik membuat pelatihan kader berdaya, kelompok keluarga berdaya dan lainnya, sehingga bisa melahirkan kelompok-kelompok masyarakat yang mandiri dan bisa membangun sistem yang berkelanjutan (*sustainable*) untuk membantu proses pembangunan negara dari segala aspek yang

memerlukan pengembangan khusus disektor tertentu. Tentu, dalam proses pembangunan tersebut ada banyak dinamika yang terjadi dalam tubuh lembaga filantropi, pada riset ini setidaknya akan dibahas beberapa dinamika aktivitas PKPU baik dilevel nasional dan internasional sebagai berikut:

a. Dinamika Aktivitas PKPU Nasional dan Internasional arah gerakan praktik kerja yang dilakukan PKPU tidak hanya pada tataran regional yang berhasil membantu beberapa wilayah di Indonesia seperti daerah korban konflik (Maluku, Maluku Utara, Poso, Aceh, Papua), bencana alam (Sumatra Barat, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Papua, Aceh, Jawa Barat), dan daerah kritis serta minus (Gunung Kidul dan lereng merapi). Melainkan PKPU juga intensif dalam membantu beberapa masalah isu kemanusiaan Internasional di beberapa negara diantaranya sebagai berikut:

1. Somalia (membantu instalasi air bersih)
2. Myanmar (program pendidikan di daerah konflik)
3. Palestina (Pembangunan sekolah Indonesia-Palestina)
4. Suriah (Membangun Kompleks yatim di Indonesia seperti Asrama)
5. Jepang (Membantu *disaster*)
6. Kenya (*charity*)
7. Bangladesh (*charity*)
8. Rohingnya (*charity*)
9. Nepal (*charity*)
10. Uyghur (*charity*)
11. Hawaii dan beberapa negara lainnya yang pernah menjadi catatan PKPU dalam membantu isu kemanusiaan.

Hal ini juga diungkapkan oleh Munthori yang menjelaskan pada saat wawancara sebagai berikut:

“Kalau untuk luar negeri atau internasional kita sasarannya ke daerah yang benar-benar membutuhkan misalnya Somalia, kita punya program instalasi air bersih kita membangun 3 titik. Sistem pengelolaan air, sistem ini kami bangun untuk mensuplay kebutuhan air bersih di sana. Kita mulai ngebor disana cukup dalam. Satu unit hampir 6M nilai programnya. Tim PKPU mulai melakukan pengeboran. Kemudian dialirkan ke penerima manfaatnya. Dan itu hampir bisa memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah tersebut yang kita jadikan sasaran. Kemudian di daerah lain korban konflik Myanmar untuk korban pengungsian di Bangladesh kita lebih banyak untuk pendidikan. Jadi kita memberdayakan masyarakat sana kita edukasi dengan bagaimana mengelola pendidikan disana. Di Palestina rencana membangun sekolah palestina. Memang punya tantangan sendiri karena kebijakan-kebijakan ini sangat-sangat dibatasi oleh pemerintah yang berkuasa di wilayah palestina. PKPU kemaren baru saja pembebasan tanah dalam proses supaya mereka mendapatkan hak-hak pendidikan yang layak. Ini baru proses pembebasan tanah dan ini akan kita cita-citakan seperti itu. Kemudian di Suriah anak-anak yatim membangun kompleks yatim kerja sama dengan LSM atau NGO yang ada di dunia tidak hanya PKPU saja, kita bareng-bareng. Kita mendirikan satu kompleks anak-anak yatim. Kita mendirikan asrama seperti asrama ada sekolahnya, ada tempat ibadahnya, ada tempat olahraganya dsb. Kalau disini panti asuhan. Alhamdulillah sudah jadi kalau itu di Suriah. Kemudian di beberapa wilayah yang lain kayak program-program yang sifatnya korban tapi itu hanya charity kayak ke Kenya, Somalia, Bangladesh, kemudian di wilayah konflik rohingya juga bahkan Sighuai untuk korban konflik di Myanmar”.

Tidak bisa dipungkiri bahwa eksistensi PKPU dalam kancah Internasional sangat cepat dan responsif, sehingga perlu apresiasi khusus apabila saat ini PKPU menjadi lembaga di bawah PBB dalam membantu misi kemanusiaan. Gerakan progresif dan profesional yang dilakukan PKPU pada dasarnya tidak serta merta

eksis tanpa dukungan dan mitra kerja yang strategis di belakangannya, pengaruh semua ini karena kekuatan afiliasi. Arah gerakan dilingkup nasional dapat merangkul afiliasi lembaga-lembaga berbasis Islam dalam mendukung misi kerja-kerja kemanusiaannya. Dalam perspektif politik ini merupakan fenomena politik filantropi yang mulai melihat patron afiliasi PKPU dalam menjalankan program kerjanya. Bahkan kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan beberapa LSM maupun lembaga filantropi Islam berbasis masyarakat sipil lainnya saat ini menunjukkan kurangnya kredibilitas atas independensi dan netralitas kinerja lembaga.

Semangat kemanusiaan atau *spirit of humanity* yang dilakukan PKPU sangat cepat dan terorganisir secara baik, dalam kancah internasionalpun tampak terlihat saat ini PKPU memiliki beberapa cabang resmi yaitu di Australia, Inggris, dan Korea Selatan, ditambah ada 12 kantor representatif seperti Amerika kemudian di Qatar, Dubai, Emirate (Arab), kemudian di Jepang dan Uni Eropa dan lainnya. Pada tahun 2019 ini akan segera *go International* dibuat penambahan kantor cabang resmi dari beberapa negara. Hal ini disampaikan oleh Munthori (2018) dalam wawancara dengan peneliti:

“Kalau perwakilan atau representatif itu sekitar ada 12 cabang. Kalau yang resmi itu di Australi, Inggris sama Korea Selatan secara resmi cabangnya. Kemudian di wilayah lain, Amerika kemudian di Qatar, Dubai, Emirate, kemudian di Jepang juga dan Uni Eropa ini baru kantor representatif atau perwakilan. Tapi rencana di 2019 akan go Internasional. Maka perlu menyiapkan SDM lebih”.

Sementara cabang di tingkat nasional PKPU sudah memiliki beberapa kantor cabang strategis dan KCP (Kantor Cabang Pembantu) yaitu yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia mulai dari Bengkulu, Sulawesi Selatan, Riau, Kalimantan Timur, Bukittinggi, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara,

Jawa Tengah, Aceh, Maluku, Jawa Barat, dan DIY yang juga sudah ada KCP Magelang, Puroworejo, dll. (<https://pkpu.org>).

Selain itu juga aktivitas *fundraising* sangat masif dilakukan yaitu pada tanggal 24 Desember 2018, PKPU HI Yogyakarta mengadakan kegiatan *Charity Stage of Humanity* dalam rangka penggalangan dana Palu dan Donggala. Dan masih hangat saat ini isu bencana nasional yang berurutan yaitu PKPU selalu siaga bencana dan mengirimkan tim khusus dalam membantu tanggap bencana, sejak gempa Lombok, tsunami Palu, Banten dan Lampung, dan tanah longsor di Sukabumi.

1.3.4 Marketing Politik Filantropi

Kemajuan teknologi membawa berbagai tantangan dalam segala bidang khususnya persaingan, baik dunia bisnis ekonomi maupun politik. Dalam dunia bisnis istilah marketing merupakan kunci utama akselerasi perkembangan bisnis yang akan menjamin hubungan antara klien dengan instansi bisnis guna mendukung pengembangan perusahaan. Sementara, dalam dunia politik tidak kalah pentingnya karena di era demokrasi kontemporer metode marketing politik didukung oleh kemajuan teknologi digital yang memudahkan komunikasi dan publikasi untuk mencari kontituen. Aktivitas filantropi berfungsi untuk membangun sebuah hubungan yang baik antara partai politik, politikus, konstituen, maupun masyarakat secara luas. Sejalan dengan ungkapan Firmanzah (2008:50) menjelaskan perspektif marketing politik artinya hubungan dalam politik harus memperhatikan cara agar partai politik yang bersangkutan dapat membangun interaksi yang intensif dan terus-menerus tidak hanya dengan para pendukungnya melainkan juga dengan

masyarakat luas. Sama halnya dengan metode yang dilakukan oleh lembaga filantropi PKPU melakukan kegiatan marketing dalam ranah politik. Dikatakan demikian karena melalui aktivitas kemitraan yang dijalankan masih pada kiblat kubu partai PKS. Gerakan akar bawah lebih menasar pada basis keislaman diyakini mampu membantu misi dakwah lembaga PKPU untuk bermitra dengan banyak pihak khususnya lembaga keagamaan. Kerjasama lembaga PKPU dilakukan oleh bidang kemitraan yang bertugas sebagai tim marketing secara profesional. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Surahmadi (2018) selaku kepala bidang kemitraan PKPU DIY mengungkapkan posisi struktural PKPU sebagai berikut:

“Lembaga PKPU memiliki struktur organisasi dari Kepala cabang yang membawahi langsung bidang operasional, pendayagunaan, dan bidang kemitraan. Operasional terkait dengan keuangan, manajemen administrasi dan SDM. Sementara tim pendayagunaan fokus pada program dilapangan dalam hal pemberdayaan dan penyaluran donasi dari donator kepada kelompok sasaran. Sementara bidang kemitraan berhubungan langsung dengan para donatur dan mencari mitra baik komunitas masyarakat maupun CSR”. Ungkap Surahmadi (2018).

Asas Islam dijadikan basis arah kemitraan PKPU, meskipun secara tidak langsung PKPU tidak berada di lapangan namun, tetap menggunakan mitra kerja dalam hal *fundrising* kegiatan. Gerakan aktivis muda muslim atau forum lembaga dakwah kampus khususnya KAMMI selalu dipercaya memiliki energi lebih dalam membantu kekuatan sumberdaya manusia yang terbatas di PKPU. Benefit yang diperoleh oleh kedua lembaga ini disepakati dengan sistem akad atau Mou. Dalam ungkapan Abdul Rais Kaharudin (2018) menjelaskan:

“Banyak lembaga dakwah. Hampir semua kampus di Jogja punya LDK, mereka terdiri dari satu payung Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus

(FLSDK) Jogjakarta. Misalnya LDK sudah Mou sama PKPU. Jadi semua LDK kalau menggalang dana diserahkan ke PKPU. Nah nanti ada keuntungan profit buat mereka nanti kita bagi dari hasil Mou itu, nah LDK punya hak 5% atau 5 juta dari seluruh hasil pertahun atau bisa juga dalam bentuk lainnya misalnya support kegiatan pemeriksaan kesehatan, kita bisa membantu fasilitasi sekaligus menjadi program kami”.

Kultur sejarah PKPU yang lahir atas inisiasi kader PKS membuat *grand design* yang dibangun PKPU juga masih pada satu garis lurus pada arah gerakan partai dengan memberikan kepedulian untuk masyarakat dengan cara berkhidmat melalui pelayanan dari lembaga sosial dan kemanusiaan. Praktik kerja kemanusiaan yang dijalankan PKPU sebenarnya bermuatan politik praktis, jika dicermati lebih mendalam PKPU memiliki hubungan kultural dengan misi marketing politik dalam membantu gerakan PKS. Dalam misi pemberdayaan dan Islamisasi masyarakat atas bantuan dari PKPU ada yang menjadi *mualaf* (masuk Islam), hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa PKS sebagai satu-satunya partai berideologi Islam yang berupaya menggunakan politik Islam untuk gerakannya. Hal ini juga dibuktikan PKS dengan komitmen tanggap dalam masalah isu kemanusiaan satu tahun terakhir dilansir dalam media yaitu terbentuknya lembaga filantropi internal *Crisis Center for Rohingnya (CC4R)* PKS. Meskipun bersifat *ad hoc* atau dibentuk hanya untuk tujuan tertentu, kegiatannya responsif menurut keterangan kader PKS Muhammad Syafi'i dimana CC4R melakukan donasi dengan anggaran dana 1,2 M bersumber dari gaji DPR RI yang dikumpulkan dan diberikan kepada Aliansi Kemanusiaan Indonesia Myanmar (AKIM), namun sayangnya dalam pemberitaan yang dimuat media Republika.co.id, tertanggal 25 September 2017 hanya ada 3 lembaga filantropi yang menerima bantuan tersebut yaitu PKPU, Dompot Dhuafa dan laziz

dewan dakwah yang menerima Kondisi inilah yang membuat publik semakin meyakini kekuatan hubungan kultural yang ada dalam lingkaran tersebut untuk kepentingan *soft politic* PKS.

Dalam penerimaan dana bantuan dari CC4R PKS tersebut terjadi perbedaan pendapat dimana pihak PKPU DIY menolak PKPU menerima dana, bahkan menjelaskan bukan hanya ketiga lembaga yang menerima melainkan semua anggota AKIM termasuk MDMC (*Muhammadiyah Disaster Management Center*) Indonesia juga mendapatkan di wilayah DIY. Sementara keterangan Rahmawati Husein selaku wakil ketua lembaga MDMC mengungkapkan tidak menerima bantuan tersebut karena MDMC bersifat independen tanpa afiliasi partai manapun. Dalam konteks inilah bentuk hubungan emosional dan kultural ideologis PKPU dan PKS saling menutup diri memberikan transparansi kepada publik. Semakin tidak transparannya PKPU, membuktikan semakin jelas hubungan antara PKPU dan PKS sebagai pembentuk lembaga sosial dalam membuktikan amal nyata kader. Sejatinnya peta politik yang dijalankan PKS sangat populis dengan pendekatan Islam dan dengan misi kesejahteraan. Gerakan operasional yang dilakukan di lapangan akan tetap berorientasi pada kaderisasi aktivis muslim mahasiswa sebagai kader muda yang akan menjadi generasi partai masa depan.

Kendati demikian, perihal marketing politik yang dijalankan PKPU membantu misi PKS dalam gerakan pemberdayaan dan jaminan kesejahteraan masyarakat, cara ini merupakan strategi lama partai guna mencari dukungan pada proses elektoral ke depan. Prinsip ini juga mengadopsi teori Firmanzah (2008:46) yang menjelaskan strategi dalam memenangkan pemilu tidak hanya dilihat sebagai strategi sesaat semasa kampanye pemilu. Strategi dapat efektif apabila partai politik

secara terus menerus melakukan aktivitas yang baik dimata masyarakat luas, karena baik tidaknya aktivitas yang dilakukan bukan menurut politikus atau partai namun perspektif masyarakat. Artinya disini sasaran yang dijalankan PKPU sebagai lembaga afiliasi partai wajar jika sebagai lembaga kesejahteraan sosial mampu melakukan *social mapping* sebelum melakukan pemberdayaan. Orientasi yang dijalankan PKPU lebih ditekankan pada program berkelanjutan (*sustainable*) setelah selesai proses kaderisasi baik pemuda berdaya, maupun keluarga berdaya, jika sudah baik akan dilepaskan secara mandiri. Hal ini menjadi sebuah alat efektif PKPU dalam mengikat hubungan kultural kepada masyarakat. Metode pendekatan PKPU melalui aktivitas pemberdayaan merupakan sasaran strategis mengenal kultur budaya masyarakat lebih dalam sehingga nantinya akan terbangun kedekatan emosional yang kuat dalam merangkul masyarakat untuk mendukung PKS.

1.3.5 Transformasi Ideologi dan Independensi Lembaga Filantropi

Perkembangan beberapa lembaga yang berasal dari masyarakat sipil khususnya lembaga filantropi nasional PKPU dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat selalu dipengaruhi oleh beberapa kondisi sosial, ekonomi dan politik yang seringkali berubah. Perubahan tersebut mempengaruhi arah gerakan lembaga filantropi dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan sosial karena harus menyesuaikan dengan sistem baru yang diterapkan pemerintah. Saat ini semakin banyak kelompok masyarakat sipil memberikan pelayanan distribusi kesejahteraan dengan membranding diri sebagai lembaga filantropi. Namun, ternyata kiprahnya dibalik layar sudah tidak netral alias memiliki indikasi afiliasi politik praktis atau cenderung mendukung salah satu

partai politik. Persoalan ini menjadi hal yang perlu kaji kembali atas legalitas independensi lembaga filantropi yang ada saat ini. Tahun politik menjadi kerentanan atas dinamika kampanye dalam menyuarakan isu populis kesejahteraan yang dilakukan oleh lembaga filantropi. Maka, untuk itu masyarakat memerlukan pendidikan politik (melek politik) sejak dini, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mampu melakukan analisis sosial atas fenomena sosial politik yang sudah tidak saleh lagi.

Faktor kondisi politik yang tidak relevan menggeser makna ideologi filantropi yang seharusnya bisa independen sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu tanpa muatan politik praktis di dalam tubuh lembaga, namun dibalik layar hubungan kultural bisa dilakukan oleh pelaku filantropi. Ideologi merupakan gagasan dan identitas profesionalitas kerja instansi atau lembaga. Arah ideologi lembaga filantropi yaitu lebih pada kerja-kerja sosial kemanusiaan dan bebas intervensi politik dalam bentuk apapun. Lembaga filantropi yang berbasis masyarakat sipil seharusnya mampu berdiri di tengah sebagai penyeimbang atau aktor *intermediary* dalam sistem negara demokrasi. Ideologi merupakan suatu hal yang harus tetap dijaga kemurniannya, termasuk tidak memihak pada salah satu afiliasi dan mampu melakukan praktik kerja sosial secara humanis serta emansipatif. Membantu persoalan sosial yang membutuhkan tindakan cepat dan tepat sasaran sesuai dengan kode etik lembaga kesejahteraan sosial.

Namun, kritikan sosial fenomena di Indonesia hadirnya lembaga filantropi selain menjadi lembaga distribusi kesejahteraan, juga memiliki afiliasi atau patronase politik pada salah satu parpol dalam membangun citra partai melalui kegiatan *charity*. Dapat di ambil contoh MDMC (*Muhammadiyah Disaster*

Management Centre), LazizMu secara struktural dan kultural merupakan lembaga filantropi organisasi Islam Muhammadiyah yang membantu dalam menangani masalah kemanusiaan. Beberapa opini publik menjustifikasi bahwa MDMC dan LazizMu melakukan politik filantropi untuk membantu Partai Amanat Nasional (PAN) dalam proses elektoral. Publik meyakini bahwa PAN identik dengan Muhammadiyah atau Muhammadiyah itu adalah PAN. Bahkan bukan hanya itu saja melainkan PKPU dan PKS memiliki hubungan kultural yang dibangun dengan model politik praktis melalui organisasi sayap partai dari segmen mahasiswa pergerakan KAMMI. Itulah pergeseran ideologi lembaga yang berasal dari masyarakat sipil, sebenarnya dalam hal ini memerlukan penelitian dan pembuktian khusus untuk mengukur netralitas dan independensi semua lembaga sosial dan kemanusiaan yang berbasis keislaman. Pasalnya PKPU memiliki garis lurus dengan ideologi partai Islam (PKS) yang mengajarkan untuk memuliakan politik dengan cara dakwah dengan misi kemanusiaan, mewujudkan dan menegakkan *amal ma'aruf* (kebaikan) dengan amal nyata melalui pembentukan lembaga sosial seperti PKPU dan Rumah Zakat. Kerja sosial di era demokrasi kontemporer rentan dengan kepentingan politik yang ingin mengandeng lembaga sosial dalam membantu distribusi kesejahteraan demi mencari basis masa melalui aktivitas pemberdayaan masyarakat baik bersifat insidental maupun jangka panjang (*sustainable*). Pragmatisme ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan partai tidak bisa masuk terlalu jauh dalam ranah kemanusiaan dan sosial karena memang sebagai organisasi politik fokus pada kebijakan dan kepentingan politik praktis. Serta fokus pada strategi partai dalam mensukseskan elektoral yang penuh kontestasi politik. Sementara, dalam hal ini berbeda dengan kontestasi lembaga filantropi yang menjelaskan area

kerja dengan kontestasi antara sektor ketiga dan negara sebagai aktor utama penyedia kesejahteraan. Berikut akan dijelaskan mengenai kontestasi lembaga filantropi dan sistem kelembagaan filantropi:

a. Kontestasi Lembaga Filantropi

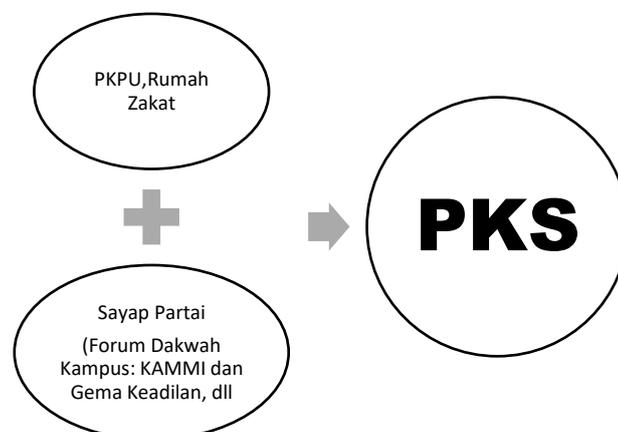
Berlomba-lomba dalam kebaikan untuk kesejahteraan dan keadilan sosial itulah motto umum lembaga filantropi nasional. Melakukan kerja dalam pelayanan kesejahteraan merupakan tugas pokok dan fungsinya. Namun, seiring dinamika politik khususnya dalam merespon isu sosial seperti bencana alam, kemiskinan, masalah ketahanan pangan, serta kerusakan lingkungan maka hal ini mengundang perhatian beberapa pihak khususnya masyarakat sipil untuk turut serta merespon isu sosial. Menjadi perhatian publik 10 tahun terakhir terjadi kontestasi penyelenggara kesejahteraan (*political goods*) bukan hanya antara masyarakat sipil dengan negara, masyarakat sipil dengan masyarakat sipil, masyarakat sipil dengan partai politik, masyarakat sipil dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR), masyarakat sipil dengan pers (media), partai politik dengan negara, partai politik dengan partai politik, partai politik dengan CSR, partai politik dengan pers. Agenda penyelenggaraan tersebut pada dasarnya dilakukan atas dasar tanggungjawab bersama dalam hal sosial untuk memberikan jaminan kualitas kehidupan kepada masyarakat. Sehingga semua lembaga yang melibatkan atau bersentuhan dengan masyarakat sebagai obyek operasionalnya wajib melakukan hal tersebut.

Komitmen lembaga yang intensif dalam kegiatan sosial tergambar dari skala aktivitasnya misalnya terdapat banyak desa binaan dan beberapa kelompok masyarakat semakin berdaya dan produktif. PKPU sendiri juga memiliki banyak desa binaan yang ada dalam lingkup kabupaten/kota se-DIY. Menurut masyarakat

dalam desa binaan yang ada di Kabupaten Gunungkidul khususnya pemberdayaan budidaya ternak semua itu sangat membantu masyarakat. Bahkan uang yang ada dapat menjadi pinjaman modal usaha untuk masyarakat setempat. Dari ketersediaan modal usaha tersebut, uang dapat berpindah tangan secara bergantian untuk memberikan modal usaha dan pinjaman secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan, bahkan aktivitas ini yang sebelumnya hanya satu RT menjadi semakin luas ke beberapa RT. Selain itu dalam pemberdayaan pengadaan air bersih masyarakat merasa sangat terbantu dapat hidup bersih dan sehat dengan air sebagai kebutuhan pokoknya.

Selain kontestasi dari aktivitas korporasi (perusahaan) maupun dari sesama lembaga filantropi lainnya yang setiap harinya menjalankan misi kemanusiaan mengalami dinamika, pasalnya saat ini muncul banyak masyarakat sipil berbondong-bondong membentuk lembaga kesejahteraan sosial (filantropi) sebagai upaya merespon masalah sosial yang berada dalam beberapa wilayah baik nasional maupun internasional. Meskipun lembaga filantropi sudah memiliki forum nasional yaitu HFI (*Humanitarian Forum Indonesia*) merupakan sebuah organisasi kemanusiaan dan pembangunan didirikan oleh 7 LSM yaitu MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center), Dompot Dhuafa, YTBI (Yayasan Tanggul Bencana Indonesia), YEU (Yakkum Emergency Unit), Karina-KWI, WVI (Wahana visi Indonesia), PPKM (Perkumpulan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat) yang memiliki komitmen membangun sinergi dan pengertian antar aktor kemanusiaan khususnya LSM yang berbeda latar belakang (<http://www.humanitarianforumindonesia.org>). HFI menjadi sebuah forum untuk menjalin komunikasi dan kordinasi dalam merespon isu sosial.

Menurut Azca, Salim, Arrobi, Asyari, dan Usman (2019:87) HFI semakin berkembang setelah beberapa lembaga ikut bergabung diantaranya PKPU (2010), Chuch Word Service (CWS) Indonesia (2011), *Habitat For Humanity* (2012), Unit DRR Union Of Churches di Indonesia (Unit PRB PGI), dan Yayasan Rebana Indonesia (2013), Rumah Zakat (2014), LPBI NU (2016), dan Baznas Tanggap Bencana. Saat ini HFI beranggotan 15 organisasi/lembaga. Akan tetapi, secara teknis dilapangan lembaga ini saling bersaing dalam menawarkan program pelayanan kesejahteraan misalnya PKPU pada kiprahnya membentuk tim marketing dan berusaha mengikat beberapa mitra kerjanya seperti forum dakwah Islam seperti DMI (Dewan Masjid Indonesia), FSLDK (Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus), KAMMI, dan beberapa lembaga pendidikan Islam yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjadi donatur tetap PKPU. Marketing menjadi basis operasional lembaga maka, itulah alasan fundamental untuk menjamin eksistensi PKPU melakukan gerakan afiliasi dengan mengikuti ruang gerak PKS sebagai Ibu PKPU. Relasi PKPU dan PKS hanya terlihat secara garis kultural karena ada aturan hukum yang menegaskan lembaga filantropi harus independen tanpa intervensi partai politik ataupun politik praktis. Hubungan antara ketiga lembaga di atas dapat diilustrasikan seperti berikut:



Sumber: Diolah oleh penulis (2018)

b. Sistem Kelembagaan Filantropi Modern (Keadilan)

Sistem kelembagaan filantropi merupakan suatu sistem yang mengatur arah mitra kerja lembaga filantropi. Dalam hal ini akan dibahas tentang relasi PKPU dengan pemerintah, lembaga filantropi lain, korporasi maupun CSR sebagai berikut:

1. Relasi PKPU dengan Pemerintah

Pemerintahan merupakan aktor penting dalam suatu negara, untuk itu hal yang dilakukan lembaga PKPU Cabang DIY dengan pemerintah daerah yang menjadi obyek sasaran adalah menjalin komunikasi intensif khususnya dalam proses perizinan. Hal yang dilakukan PKPU sebelumnya selalu mengkomunikasikan, mengkoordinasikan perihal proses pembangunan dan pemberdayaan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) karena di dalamnya terdapat forum CSR yang akan memudahkan sistem koordinasi. Sementara, hubungan dengan beberapa dinas sifatnya hanya pemberitahuan program kegiatan. Untuk kegiatan kolaborasi antara PKPU dan pemerintah sangat jarang, jikapun ada hanya dari dinas sosial karena secara tidak langsung merupakan mitra kerja PKPU yang memiliki orientasi dalam kesejahteraan sosial. Hal ini disampaikan oleh Munthori dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Jadi hubungan paling terkait adalah dinas sosial. Memang yang mengurus perizinan dan sebagainya sejak awal intensif berkomunikasi dengan pemerintah daerah, di Bappeda, karena disitu ada forum CSR. Sementara PKPU berada di forum Bappeda Kota Jogja. Kemudian dinas-dinas yang lain biasanya dinas pendidikan sifatnya kadang hanya pemberitahuan program kegiatan contohnya ada beasiswa. Untuk kolaborasi kerjasama jarang. Yang sering dengan dinas sosialnya karena PKPU juga mitra kerja mereka bahkan PKPU juga sering

dijadikan narasumber kegiatan-kegiatan mitra pemerintah”. Ungkap Munthori (2018).

Gambaran di atas semakin menjelaskan adanya kompetisi yang dilakukan antara PKPU dan pemerintah terlihat dengan tidak adanya sinergi kuat yang dibangun kedua belah pihak lembaga. Mereka berusaha menampilkan program unggulan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sebenarnya ada beberapa program kegiatan yang dapat dikolaborasikan, secara tidak langsung tentu akan menghemat biaya operasional. Namun, keduanya tidak melakukan kolaborasi tersebut. Sifat kolaborasi insidental dalam beberapa agenda seremonial dilakukan oleh PKPU ataupun pemerintah yang melakukan kegiatan. Kedua lembaga tampil dengan sistem kerja masing-masing. Sebenarnya kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan politik rezim kekuasaan dimana negara tetap akan hadir sebagai aktor utama dalam proses jaminan kesejahteraan dan keadilan seluruh masyarakat khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sementara, peran PKPU sebagai lembaga berbasis masyarakat sipil juga tampil mengisi ruang kosong yang gagal disediakan oleh negara khususnya jaminan kesehatan, pendidikan dan penanggulangan bencana serta ketersediaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari di daerah minus merupakan keprihatinan yang dirasakan masyarakat, dimana setiap harinya harus hidup tidak sehat. Semua itu tak lepas air merupakan sumber kehidupan yang harus tersedia dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Keberhasilan pembangunan sistem pengadaan air merupakan profesionalitas kerja-kerja sosial PKPU dalam tataran wilayah regional DIY. Dalam hal ini, perlunya pemerintah melihat aspek ini

sebagai evaluasi kinerja dalam memberikan kesejahteraan belum merata secara keseluruhan.

2. Relasi PKPU dengan Lembaga Filantropi Lainnya

Relasi yang dibangun oleh PKPU sebagai lembaga sosial dengan beberapa lembaga filantropi lainnya sangat baik dan terorganisir dibuktikan dengan bergabungnya PKPU dengan HFI, FOZ (Forum Organisasi Zakat), dan AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia Myanmar) merupakan salah satu forum yang murni dibentuk oleh inisiasi PKPU. Dalam beberapa forum tersebut isinya ada banyak lembaga filantropi Indonesia yang turut bergabung bahu-membahu merespon masalah sosial. Sikap yang dilakukan PKPU tetap menjalin komunikasi dan kordinasi secara masif bersama malakukan kebaikan untuk keadilan. Berkat hadirnya AKIM selanjutnya forum ini dirubah menjadi IH (*Indonesia Humanitarian*) yang memiliki kegiatan bukan saja di Myanmar melainkan bisa ke beberapa negara yang mengalami masalah sosial. Dalam penelitian disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Justru kami yang menginiasi AKIM. Kami awalnya kasus Myanmar, lembaga-lembaga susah masuk Myanmar. Bahkan PBB sendiri dari tidak boleh masuk. Tapi 2012 konflik awal di Myanmar kita sudah masuk disitu, dan sampe sekarang masih bisa masuk. Dari situ kemudian kenapa tidak bersama-sama ada MDMC, LPBNU, DD, LazizNu dll. Terus akhirnya menginiasi AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia Myanmar). Yang sekarang menjadi IH (Indonesia Humanitarian) yang berfungsi tidak hanya Myanmar saja. Tapi kegiatan yang lain di beberapa negara. Ketuanya saat ini dari LPBNU”. Ungkap Munthori (2018).

Meskipun relasi sosial antar kelembagaan berjalan dengan baik dan penuh komunikasi namun, realitas kinerja masing-masing lembaga penuh kompetisi

untuk saling menunjukkan profesionalitas lembaga dalam melayani kesejahteraan sosial masyarakat. Hubungan kompetitif ini karena masing-masing lembaga ingin tampil eksis dalam ranah publik. Terutama dalam peliputan berita, kita bisa membaca secara lebih mendalam beberapa lembaga filantropi yang selalu disorot media massa. Salah satunya PKPU juga terlihat koran *online* Republika masif dalam meliput aktivitas PKPU sebagai organisasi sosial yang kiprahnya sudah berada di level internasional. Sebagai lembaga resmi dalam nomenklatur organisasi terbagi menjadi tiga yaitu pemerintah sebagai sektor pertama, kedua adalah swasta dan sektor ketiga adalah organisasi sosial.

Lembaga PKPU merupakan sektor ketiga yang dikenal dengan organisasi sosial atau non profit bertujuan memberikan pelayanan (*service*) atas kebutuhan dasar masyarakat dan menyediakan model pendampingan (*advocacy*) menuju masyarakat mandiri (Latief, 2013:32). Dia juga menegaskan organisasi tipe ini sebagai upaya untuk menciptakan demokrasi politik, sosial, dan ekonomi melalui partisipasi masyarakat. Dapat dipercaya cara ini merupakan solusi efektif membangun relasi sosial dengan *background* organisasi sektor tertentu karena akan mengajak partisipasi masyarakat dalam mensukseskan agenda program kerja. Sektor ketiga ini akan cenderung mengisi kekosongan yang belum disediakan oleh pemerintah selaku penanggungjawab kesejahteraan nasional. Dalam sektor ketiga kerja-kerja sosial akan diisi oleh beberapa relawan atau *voluntary* yang akan mengabdikan dan merangkul permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai kemampuan. Fungsi kerja organisasi sektor ketiga memang fokus pada penanganan masalah sosial, dengan ciri dan peran berbeda-beda.

Hilman Latief (2013:32) organisasi sektor ketiga memiliki ciri dan peran bervariasi sebagai berikut:

1. Umumnya berasal dari masyarakat baik berasal dari tradisi lokal maupun inspirasi keagamaan
2. Memiliki tujuan untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berorientasi pada pengembangan pembangunan.
3. Mempunyai mekanisme penggalangan dana sendiri, atau bukan subsidi negara
4. Berbasis kerelawanan atau semi kerelawanan. Sedangkan sektor ketiga ini juga memiliki peran kerja sebagai berikut: (a) Memberikan pelayanan melalui bentuk kerjasama dengan negara (b) Mengidentifikasi dan memformulasi kebutuhan-kebutuhan baru di masyarakat (c) Memelihara dan mengubah sistem nilai dalam masyarakat (d) Memediasi antar individu dengan negara (e) Menyediakan ruang dan forum bagi individu untuk membangun pranata sosial.

3. Relasi PKPU dengan Korporasi atau CSR

Hubungan yang dilakukan antara PKPU dengan beberapa korporasi di wilayah regional DIY cukup baik dibuktikan dengan jalinan kemitraan dengan CSR perusahaan Sarihusada, PT. Telekomunikasi dan beberapa perusahaan lainnya yang mempunyai komitmen merespon masalah sosial. Relasi PKPU selalu menerobos perusahaan yang memiliki prospek jangka panjang atau dalam kata lain perusahaan besar dan maju yang harapannya akan menjadi donatur tetap demi membantu operasional program kerja. Mereka akan lebih cepat masuk dalam melakukan audiensi tawaran program kerja. PKPU membawa

branding keislaman maka ini menjadi poin khusus lembaga PKPU bisa masuk dalam ranah publik karena solidaritas Islam seperti di Indonesia sebagai agama Islam terbesar di dunia.